



Laode Saripudin Daud
Tanzil
La Ode Muh. Syahartijan



RELASI PENGUASA DAN PENGUSAHA

Laode Saripudin Daud, Dkk

RELASI PENGUASA DAN PENGUSAHA



Bisnis dengan politik menjadi dua hal yang saling berkait dan tidak dapat dipisahkan, keduanya menjadi faktor utama sekaligus pembeda dalam penentu dalam berbagai hal. Di dalam negara demokrasi yang menganut sistem multi partai serta pemilihan secara langsung baik memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR pusat, DPRD tingkat satu dan dua – sudah barang tentu menggunakan cost politic yang besar dalam pelaksanaannya. Hal ini tentunya menjadi sebuah atensi para calon kandidat yang akan bertarung dalam kontestasi di semua levelnya.

Keterlibatan pebisnis atau kalangan usaha dalam kontestasi perpolitikan di semua level, sudah sangat lumrah dan sudah terjadi sejak lama, artinya peran pengusaha sangat signifikan dalam rangka memenangkan calon yang diusungnya, begitu juga dalam hal partai politik, selama ini keterlibatan pengusaha dalam partai politik sangat nyata, hal ini dapat dibuktikan dengan para pengusaha masuk dalam kepengurusan partai politik, bahkan pucuk pimpinan atau ketua umum mereka (partai politik) berlatar belakang pengusaha sebelum aktif menjabat di partai politik. Dalam buku ini penulis menyajikan dan mendeskripsikan bagaimana relasi penguasa dan pengusaha dalam momentum pemilihan kepala daerah. Karena itu, buku ini sangat penting menjadi referensi bagi politisi, akademisi, dan mahasiswa.



Literacy Institute
© Jl. Wanggu, Kendari 93231
✉ literacyinstitute@yahoo.com
🌐 www.literacyinstitute.org
☎ 0852-9979-3323



RELASI PENGUASA DAN PENGUSAHA

Laode Saripudin Daud
Tanzil
La Ode Muh. Syahartijan

RELASI PENGUASA DAN PENGUSAHA



Literacy Institute, 2019

RELASI PENGUASA DAN PENGUSAHA

Penulis

Laode Saripudin Daud, Tanzil, dan La Ode Muh. Syahartijan

ISBN: 978-602-5722-13-4

xi + 100 hlm.; 14,8 x 21 cm

Editor/Penyunting

Dr. Ambo Upe, S.Sos, M.Si.

Desain Sampul

Rio Kurniawan

Tata Letak

Agung Dermawansa

Penerbit

Literacy Institute

Bumi Wanggu Permai II Blok D/12
Kota Kendari, 93231, Telp. 085299793323

Email: literacyinstitute@yahoo.com

Website: www.literacyinstitute.org

Cetakan Pertama: April, 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit.

Kata Pengantar

Bisnis dengan politik menjadi dua hal yang saling berkait dan tidak dapat dipisahkan, keduanya menjadi faktor utama sekaligus pembeda dalam penentu dalam berbagai hal. Di dalam negara demokrasi yang menganut sistem multi partai serta pemilihan secara langsung baik – memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR pusat, DPRD tingkat satu dan dua – sudah barang tentu menggunakan *cost politic* yang besar dalam pelaksanaannya, hal ini tentunya menjadi sebuah atensi para calon kandidat yang akan bertarung dalam kontestasi di semua levelnya.

Keterlibatan pebisnis atau kalangan usaha dalam kontestasi perpolitikan di semua level, sudah sangat lumrah dan sudah terjadi sejak lama, artinya peran pengusaha sangat signifikan dalam rangka memenangkan calon yang diusungnya, begitu juga dalam hal partai politik, selama ini keterlibatan pengusaha dalam partai politik sangat nyata, hal ini dapat dibuktikan dengan para pengusaha masuk dalam kepengurusan partai politik, bahkan pucuk pimpinan atau ketua umum mereka (partai politik) berlatar belakang pengusaha sebelum aktif menjabat di partai politik. Di level propinsi dan kabupaten/kota juga para pucuk pimpinan partai politik.

No bourgeoisie no democracy (Barrington Moore, 1966). Dewasa ini banyak pengusaha menyepakati doktrin *Moore* ini dan bahkan ditandai dengan banyaknya pengusaha berbondong-bondong terjun dalam dunia politik. Hal ini merupakan trend dari dulu, baik di luar negeri maupun di Indonesia, banyak pengusaha menguasai jabatan publik. Pada masa Orde Baru lalu, peran pengusaha hanya sebatas *supporting system* belaka, dari jejaring politik dan ekonomi.

Hal ini disebabkan pemerintah pada waktu itu dihadapkan pada permasalahan kekurangan modal sehingga pemerintah memberikan insentif kepada pemilik capital swasta atau pengusaha berupa kepercayaan mau bekerjasama dengan pemerintah (Barr, 1990). Peran negara pada masa itu sangat penting dalam menumbuhkan borjuasi seperti yang dikemukakan oleh *Barrington Moore* di atas. Pada masa itu modal, kontrak, konsesi, dan kredit dari negara diberikan secara langsung kepada pengusaha, namun pada kesempatan yang sama pengusaha-pengusaha swasta itu telah menjalankan atau memanfaatkannya.

Berubahnya konstelasi politik dan ekonomi pasca-Soeharto membuat kekuasaan tersebar kemana-mana serta pengaruh politiknya yang luas. Akibatnya, upaya untuk mendapatkan kemudahan dan proteksi politik dalam berbisnis makin lebar dan berbiaya tinggi. Semakin banyak kelompok pengusaha mendekati pusat kekuasaan dengan cara menyuap, sehingga menimbulkan biaya transaksi keuntungan pemburuan rente dalam kekuasaan. Dalam konteks kekinian, persyaratan itu semakin mendekati harapan karena beberapa alasan pokok yang mendasari fenomena itu sebagai berikut. Pertama, atmosfer politik di Indonesia didominasi ideologi pragmatisme yang mengakibatkan jagat perpolitikan nasional keruh dengan perebutan kepentingan politik. Kedua, hukum dan perundang-undangan masih merupakan produk politik kepentingan sempit dan sesaat. Ketiga, birokrasi yang korup dan parasitik telah menjadi medan pertarungan politik partai-partai politik untuk menjadi sarana akses terhadap kekayaan negara. Keempat, partai politik dan lembaga perwakilan rakyat masih sekadar broker politik yang memberlakukan politik sebagai dagangan yang dapat diperjualbelikan untuk kepentingan yang sangat subjektif. Kondisi ini dapat saja dimanfaatkan oleh pengusaha

dalam pola permainan *rent seeking* yang mengakibatkan adanya ketidakadilan ekonomi (Kompas, 28/12/06).

Dalam relasi pengusaha-penguasa, salah satu cara untuk membaca situasi perilaku penguasa dalam memaksimalkan keuntungannya adalah dengan melakukan pendekatan *the New Political Economy* atau yang lebih dikenal dengan istilah *Rational Choice*. Asumsi dasar yang dibangun dalam pendekatan ini adalah bahwa manusia adalah makhluk yang egois dan rasional. Sifat ini akan membuat manusia untuk selalu berusaha secara rasional dapat dilaksanakan dan akan membantu tercapainya kepentingan tersebut. Pada intinya manusia akan berusaha untuk sebisa mungkin mendapatkan keuntungan yang optimal dengan memanfaatkan segala fasilitas dan kemampuan yang ia miliki dengan segala keterbatasan atau kendala yang ada.

Relasi pengusaha-penguasa dalam demokrasi memaksimalkan kepentingan individual mereka. Kisah tentang pengusaha yang menerobos kekuasaan, baik karena kedekatan, kolusi, maupun peran ganda, sesungguhnya telah masuk dalam kajian ekonomi politik sejak dulu. Pembahasan ini pertama kali dilakukan oleh *Anne Krueger* pada tahun 1973, yang membuat makalah mandiri dari karya *Gordon Tullock*. Teori yang mengkaji masalah itu dikenal dengan sebutan teori perburuan rente ekonomi (*Theory of Economic Rent-Seeking*). Teori tersebut menjelaskan fenomena perilaku pengusaha untuk mendapatkan lisensi khusus, monopoli dan fasilitas lainnya dari pihak yang berwenang, yang mempunyai kekuasaan atas bidang tersebut. Dengan lisensi khusus, maka dengan mudah pelaku yang lain tidak bisa masuk pasar. Karena itu, perilaku pemburu rente ekonomi biasanya merupakan perilaku anti persaingan atau menghindari persaingan. Seiring dengan alasan sistem ekonomi politik modern dewasa ini, domain negara harus dipisah dari domain swasta. Masing-masing memiliki ciri dan karakteristik berbeda serta diatur dengan aturan

main yang berbeda pula. Campur-aduk keduanya menyebabkan kedua sistem tersebut mengalami distorsi, yang akan berujung pada ketidakadilan, kesenjangan ekonomi, monopoli, dan korporatisme. Pengusaha memperoleh keuntungan dengan cara bukan persaingan yang sehat di dalam pasar. Kekuasaan dipakai untuk memengaruhi pasar sehingga mengalami distorsi untuk kepentingannya. Dalam praktiknya perburuan rente ekonomi, pelaku usaha mengundang kekuasaan atau memengaruhi kekuasaan untuk mengambil dari suatu nilai yang tidak dikompensasi. Retorika tentang “pelayanan negara” mengandaikan bahwa para pejabat pemerintah bagaimanapun juga akan diarahkan untuk bertindak dalam kepentingan publik luas, meski dalam kenyataannya perilaku mereka secara empiris lebih dapat dijelaskan lewat motif-motif kepentingan pribadi yang lebih sempit. Perilaku para pejabat negara dapat dipengaruhi oleh suap, kampanye sumbangan hadiah kepada anggota keluarga, atau janji masa depan. Sejumlah besar aktivitas sektor swasta dengan demikian diselewengkan dari kewirausahaan menghasilkan kekayaan ke perburuan rente (Krueger 1974; Buchanan, Tullock, dkk, 1980).

Contoh praktik perburuan rente ekonomi berkembang pesat di negara berkembang, misalnya Thailand, Filipina, India, Korea Selatan dan Indonesia. Salah satu ciri penting dari praktik rente ekonomi adalah masuknya pengusaha ke dalam lingkaran kekuasaan, atau wilayah jabatan publik. Yushihara Kunio (1990) menyebut Kapitalis yang berkembang di negara-negara berkembang ini adalah kapitalis semu (*ersatz capitalism*), yaitu pengusaha yang tumbuh karena bergan dengan dengan penguasa atau rezim pemerintah. Pengusaha semu ini kemudian mendapatkan privilege (kemudahan) serta proteksi atau perlindungan dari pengusaha. Takshin Shinawatra memulai karir politiknya selepas pensiun dari perwira kepolisian, dia merupakan pengusaha penyuplai logistik dan ATK kepada instansi-instansi

pemerintahan. Lalu berkembang tahun 1990-an ia mendapat lisensi tv kabel, sampai menjadikannya pengusaha bidang telekomunikasi. Lalu di Filipina, pengusaha menguasai ranah politik dan bisnis yang dibangun dengan cara yang sama, yakni dengan memusatkan perhatian kepada pemimpin tertinggi yaitu Presiden sebagai patron pengusaha, ditemukan pula banyak yang hijrah para pengusaha menguasai aparatur-aparatur di pemerintahan, gejala ini disebut dengan *booty capitalism*, yaitu berpindah nya kekuatan sektor privat (*private sector*) ke dalam pelayanan sektor publik pemerintahan.

Di Indonesia praktik semacam ini juga sangat masif, penelitian yang dilakukan oleh Yushihara Kunio (1990), Richard Hefner (1998) serta Robinson dan Hadiz (2004), menunjukkan pola yang sama demikian, pada era order baru (yang kepemimpinan militer-otoriter) praktik seperti ini juga lumrah terjadi, walaupun presiden Soeharto bukan dari kalangan pengusaha, namun contoh yang paling nyata adalah datang dari adiknya sendiri yaitu Probo Sutedjo. Sang adik inilah yang mengatur urusan bisnis keluarga Cendana, penguasaan perkebunan, minyak dan tambang menjadi garapan utama, praktik “haram” tersebut juga menurun kepada anak-anak Pak Harto, dimana sang anak yakni Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto) merambah sektor otomotif dengan mendirikan industri perakitan mobil yang sepenuhnya dikendalikannya, hal ini tentunya dengan mendapatkan *privilege* dari sang ayah.

Contoh yang paling nyata setelah reformasi adalah dimana pengusaha seperti Jusuf Kalla, Aburizal Bakrie menguasai Partai Golkar, sementara ada Soetrisno Bachir di PAN, yang kemudian mereka menduduki kursi wakil presiden dan menteri-mentri. Selain itu nama-nama seperti Hary Tanoesudibyo, Surya Paloh yang merupakan pengusaha di bidang media juga terjun di bidang politik dengan menjadi pucuk pimpinan mereka masing-masing, yakni Perindo dan

Nasdem. Masuknya para pengusaha tanah air dalam ranah kekuasaan dan menjadi pimpinan partai politik tentunya memiliki maksud yang penting bagi publik dan mereka sendiri, bagi publik, nama-nama pengusaha merupakan gejala dan memberikan warna baru dalam dunia perpolitikan bangsa ini, yang sebelumnya diwarnai oleh orde baru dengan TNI nya. Hadir nya pengusaha dianggap lebih “*friendly*” daripada kalangan militer yang dikenal otoriter. Para pengusaha dianggap mampu memberikan jawaban kegelisahan masyarakat akan pemerintahan yang lebih demokratis selepas orde baru. Bagi para pengusaha sendiri, kehadiran mereka di dunia perpolitikan dan pemerintahan tentunya diharapkan mampu memberikan efek yang positif bagi bisnis atau usaha mereka, dalam dunia usaha/bisnis hal yang paling penting ialah adanya jaminan keamanan, iklim yang sehat serta kepastian hukum, hal itu tentu bisa didapatkan dengan mereka terjun langsung dalam ranah kekuasaan (baik eksekutif maupun legislatif). Dengan mereka turun langsung membuat dan menjalankan kebijakan dan Undang-undang tentunya diharapkan memberikan keuntungan bagi bisnis/usaha mereka.

Dalam konteks daerah, (dalam hal ini penguasa di daerah) pun tidak luput dari praktik demikian, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang secara langsung dipilih oleh masyarakat merupakan sebuah “hajatan politik” yang dikehendaki demokrasi, prinsip kedaulatan dari, oleh dan untuk rakyat adalah manifestasi hal tersebut. Namun di tengah hiruk pikuk rakyat yang sedang suka cita memilih langsung pemimpin untuk daerahnya, ada konsekuensi anggaran yang dibebankan atas prosesi itu. Anggaran besar wajib digelontorkan demi sukses dan terselenggaranya hajatan politik tersebut, anggaran besar tentu saja tidak hanya diperlukan oleh pihak penyelenggara (dalam hal ini KPUD baik propinsi maupun kabupaten/kota) saja, melainkan

yang lebih fantastis dibebankan kepada para calon yang ikut kontes-tasi pemilihan kepala daerah tersebut.

Hal ini yang kemudian menjadi celah masuknya para peng-usaha “berkontribusi” dalam rangka mendukung para jagoannya ber-laga di gelanggang pemilihan kepala daerah. Keterlibatan para peng-usaha dalam membantu membiayai para jagoannya tentunya memiliki maksud tertentu, seperti yang telah diuraikan sebelumnya, kepenting-an pelaku usaha ialah bagaiman usahanya mendapat jaminan ke-amanan, kepastian dan perlindungan dan bisa berkembang, dan yang dapat menjamin hal itu adalah pemerintah daerah. Selain hal itu, pengusaha yang berjasa mengantarkan salah satu calon berhasil me-menangi kontestasi pilkada adalah agar mendapatkan proyek-proyek yang ada di dinas atau instansi daerah tersebut, hal ini menjadi lumpah terjadi dan merupakan “upaya balas budi” sang kepala daerah yang telah di bantu pada gelaran pilkada kemarin.

Tulisan yang diolah dari skripsi penulis ini mencoba menyaji-kan dan mendeskripsikan bagaimana praktik tersebut terjadi di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara pada gelaran Pilkada tahun 2015 lalu. Bagaimana kemudian peran pengusaha dalam terpilihnya pengusaha di daerah tersebut. Saya atas nama Koordinator Prodi Ilmu Politik FISIP UHO mengapresiasi usaha dan kerja keras yang di-lakukan oleh penulis. Semoga usaha yang dilakukan dapat menjadi inspirasi bagi pengembangan akademik di Program Studi Ilmu Politik FISIP UHO. Selamat Membaca.

Billahit Taufiqwalhidayah
Kota Lulo, Maret 2018

Koordinator Ilmu Politik FISIP UHO

Dr. H. Eka Suaib, M.Si.

Daftar Isi

Bab 1 Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Manfaat Penelitian	16
Bab 2 Kajian Pustaka	17
A. Konsep Elite Politik	17
B. Konsep Pemilihan Umum Kepala Daerah Langsung	21
C. Penelitian Relevan	22
D. Alur Pemikiran	28
Bab 3 Metode Penelitian	35
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	35
B. Jenis Penelitian	35
C. Jenis Data	36
D. Penentuan Informan	37
E. Teknik Pengumpulan Data	40
F. Teknik Analisis Data	42
Bab 4 Hasil dan Pembahasan	43
A. Gambaran Umum Kabupaten Wakatobi	43
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	74
Bab 5 Penutup	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	95
Daftar Pustaka	97

Bab 1

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Desain muatan kepentingan yang diformulasikan ke dalam relasi dan konsensus antara elite politik dengan kelompok-kelompok yang berpengaruh di arash lokal. Untuk mewujudkan kepentingan itu, masing-masing kelompok berupaya memaksimalkan tujuan dan kepentingannya agar terakomodasi oleh kandidat bupati yang diusung. Pada setiap suksesi politik, ketika pesta demokrasi itu sarat akan kepentingan politik melingkupinya dan menjadikan arena investasi yang tidak pernah sepi dari problema relasi penguasa peng-usaha. Penguasa sedemikian rupa mengkondisikan agar jejaring kekuasaan “*the power*” menjadi tempat bersimbiosis dan beriteraksi kalangan pengusaha dalam dunia politik praktis.

Gradasi hubungan penguasa dengan pengusaha dalam dunia politik sulit terpisahkan, dunia politik membutuhkan asupan dana untuk menggulirkan dan memperkuat fondasi strategi politik demi memperoleh kekuasaan. Tentu saja dana itu disedot dari kantong dan pundi-pundi para pengusaha. Di sisi lain, pengusaha memformulasikan hubungan yang *real* untuk mendapatkan ganjaran dan imbalan yang seimbang dari kontribusi yang disumbangkan kepada elite politik.

Sejatinya ranah politik dan bisnis merupakan dua hal yang berbeda. Artinya dua ranah ini bergerak dalam ruang yang berbeda dengan orientasi yang tidak sama. Politik berorientasi pada segala tata cara untuk meraih kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan.

Sementara ranah bisnis berorientasi pada keuntungan secara materiil atau keuntungan ekonomi. Namun, dalam beberapa titik pada nyatanya keduanya bersinggungan satu dengan yang lainnya. Kompleksitas jaman menjadikan garis batas antara keduanya menjadi kabur. Politik begitu akrab dengan bisnis dan dunia bisnis begitu syarat dengan politik. Relasi bisnis dan politik tersebut secara sederhana diklasifikasikan oleh Yoshihara Kunio (1990) menjadi enam tipe berikut, yaitu: a) keluarga presiden, b) kapitalis birokrat, c) kapitalis konco, d) politisi yang beralih menjadi kapitalis, e) kapitalis yang beralih menjadi politisi, dan f) kapitalis lain yang berkoneksi pemerintah.

Konteks sejarah menunjukkan bahwa relasi antara pengusaha dan politisi di Indonesia telah terjalin sejak lama. Pada masa orde baru, para pengusaha kita memiliki kedekatan khusus dengan pemerintah khususnya dengan presiden. Dalam banyak literatur disebutkan bahwa pada masa itu Soeharto telah berhasil membangun kerajaan politik sekaligus kerajaan bisnisnya. Beberapa analis politik menyebut Soeharto membentuk sebuah oligarki politik. Yang dimaksud oligarki sendiri oleh Jeffery Winters (2014) adalah *“oligarchyisde fined by the politics of wealth defense”*. Kurang lebih artinya adalah oligarki sebagai sebuah politik mempertahankan kekayaan atau kesejahteraan.

Selanjutnya, hasil studi Vedi Hadiz (2005) dalam bukunya yang berjudul “dinamika kekuasaan ekonomi politik di Indonesia pasca soeharto” menunjukkan bahwa Soeharto telah membentuk oligarki politik yang terdiri dari anggota militer, pengusaha cina, beberapa pengusaha pribumi, sekaligus kerajaan bisnis yang dibangun oleh anak-anaknya. Diantarnya adalah perusahaan produsen kayu lapis yang diketuai oleh Bob Hasan, Liem Sioe Liong pemilik Salim Group, keluarga Ryadi pemilik Lippo. Kedua anak Soeharto

yakni Bambang Tri Hatmojo yang memiliki perusahaan Bimantara yang meliputi perbankan, perdagangan, gasalam, telekomunikasi dan produksi otomotif. Sementara Tomy Soeharto memiliki Humpuss yang bergerak dalam bidang insdutri, termasuk angkutan udara, otomotif, supermarket, dan distribusi komunitas. Kondisi tersebut tidak jauh berbeda pasca jatuhnya rezim orde baru dan masuknya era reformasi. Oligarki tetap bertengger dalam perpolitikan kita.

Reformasi tak mampu mengubah tatanan politik oligarki meski rezim telah terganti. Seperti yang diungkapkan oleh Winters (2014) dalam jurnalnya yang berjudul “*Oligarchy and Democracy in Indonesia*” yang menyatakan bahwa: “*Oligarchs have the money, mediaempires, network and positions in the parties (or there sources to create new ones) that hallow them to dominate the new democratic system, and pursue strategies of wealth defense out side the political theater*”. Kurang lebih artinya adalah: “Oligarki mempunyai uang, kerajaan media, jaringan dan posisi dalam partai (atau sumber daya untuk membuat partai baru) yang memungkinkan mereka untuk mendominasi sistem demokrasi baru dan mengejar strategi pertahanan kekayaan diluar panggung politik”.

Dengan kata lain selama oligarki masih memiliki sumber daya yang cukup mereka akan tetap ada meskipun rezim berganti seperti kondisi saat ini. Kondisi ini terbukti ketika pasca reformasi 1998 di mana panggung politik kita pada level nasional telah dihiasi oleh waja-wajah pengusaha. Meskipun sebagian dari mereka memiliki latar belakang politik yang kuat. Namun mereka juga memiliki jaringan usaha yang sangat besar. Dari hasil studinya, Winters berhasil memetakan beberapa politisi yang menguasai bisnis khususnya bisnis dibidang media dan bisnis-bisnis lainnya. Seperti yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Politisi dan Jaringan Oligarkinya di Indonesia

NO	Politisi	Pendukung Oligarki	Media	Perusahaan Lain	Afiliasi/ Pemilik Partai Politik
1	Aburizal Bakrie	Sendiri	TVOne, ANTV, Visi Media Asia, VivaNews.com	Bakrie Group	Golkar
2	Dahlan Iskan	-	Jawa Pos Group (Radar, TV Network)	Fangbian Iskan Corporindo (FIC)	Demokrat
3	Susilo Bambang Yudoyono	Budi Sampoerna, Sunaryo Sampoerna, Ramadhan	Media Nusa Perdana (Jurnal Nasional), Trans Crop (Trans Tv, Trans 7),	Sampoerna Group, Lippo Group, CT Group (Bank Mega, Trnas Property,	Demokrat
4		Pohan, Chairul Tanjung, James Roady (Pether Gonta)	Detik.com, Lippo Media Berita Satu Media Holdings (suara pembaharuan, Jakarta globe, investor daily, beritasatu.com)	Transmart	
5	Surya Paloh	Sendiri	Metro Tv, Media Indonesia	Papandayan Hotel, Bali Intercontinent al Hotel, Seraton Media Hotel, PT. Surya Persindo, dll	Nasional Demokrasi (Nasdem)

6	Prabowo	Hasim Brothers	-	Nusantara Energy Group, PT. Kertas Nusantara, PT. Klani Kertas, PT. Belantara Pusaka, dll	Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
7	Wiranto	Hary Tanoesodibjo (sebelum mendirikan partai sendiri)	MNC Groups, RCTI, Global TV, MNC TV, Sindo Radio, Seputar Indonesia, Okezone	-	Hati Nurani Rakyat (Hanura)
8	Megawati	Taufik Kiemas, Arifin Panigoro	-	-	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
9	Jusuf Kalla	Sendiri	-	Kalla Group: PT. Bumi Karsa, PT. Bumi Sarana Utama, PT. Kalla Inti Karsa, dll.	Golkar

Sumber: Jeffry Winters, *Oligarchy and Democracy in Indonesia* dalam Michele Ford dan Thomas B. Pepinsky (ed), *Beyond Oligarchy*, 2014

Nama-nama yang tertulis dalam tabel tersebut adalah mereka yang beberapa kali muncul dan terpilih dalam bursa Pilpres selama periode 2004 dan 2009. Fakta ini semakin menguatkan argumen bahwa dunia politik kita sangat erat dengan pengusaha. Bahkan Pilpres 2014 dimenangkan oleh pasangan pengusaha Jokowi dan Jusuf Kalla. Sebelum terjun dalam politik Jokowi adalah pengusaha

furniture dari Kota Solo. Sementara Jusuf Kalla adalah pengusaha Sukses dari Sulawesi yang memiliki jaringan perusahaan yang besar diberbagai daerah di Indonesia. Selain itu, pengusaha juga banyak ditemui pada lembaga legislatif. Tercatat sebesar 44,6% anggota DPR RI memiliki latar belakang pengusaha. Tidak jauh berbeda dengan level nasional, relasi antara pengusaha dan politisi juga terjalin diranah lokal. Pemilu masih dijadikan salah satu instrumen yang paling kuat untuk membangun relasi. Jika di ranah nasional relasi dibangun melalui Pilpres dan Pileg maka di level lokal relasi tersebut terjalin melalui Pemilukada. Bahkan beberapa kepala daerah terpilih di Indonesia berasal dari kalangan pengusaha. Seperti yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Pengusaha Kalangan Pengusaha di Tingkat Daerah

No	Nama Pengusaha	Usaha Yang Dimiliki	Jabatan	Periode I	Periode II
1	I Wayan Geredeg	<ul style="list-style-type: none"> - PT. Arsa Buana Manunggal (ABM) - Direktur CV Karya Dharma - CV Singarsa 	Bupati Karang Asem	2005-2010	2010-2015
2	Joko Widodo	Bidang Ekspor, Pengusaha Mebel	Walikota Solo	2005-2010	2010-2012
3	Herry Zudianto	Pengusaha Batik Margaria Group	Walikota Yogyakarta	2001-2006	2006-2012
4	Haeny Relawati Rini Widyastuti	Pengusaha SPBU	Bupati Tuban	2001-2006	2006-2011

5	Ikmal Jaya	- Pratama - Lippo Karawachi, Bintaro Jaya - Bukit Sentul (Anak Ismail dan Rokhayah)	Walikota Tegal	2009- 2014	-
6	Rina Iriani	Pengusaha Salon	Bupati Karangany ar	2003- 2008	2008-2013
7	Danar Rahmanto	Pengusaha otobus Timbul Jaya	Bupati Wonogiri	2010- 2015	-
8	Mukti Agung Wibowo	Direktur PO Dewi Sri (Anak Ismail dan Rokhayah)	Wakil Bupati Pemalang	2010- 2015	-
9	Buyar Winarso	Pemilik Yayasan Sekolah (SD Global Islamic School)	Bupati Kebumen	2010- 2015	-
10	Haryanti Sutrisno	Pengusaha Kesehatan	Bupati Kediri	2010- 2015	2016-2021
11	Saiful Illah	Pengusaha Tambak	Bupati Sidoarjo	2010- 2015	2016-2021
12	Idza Priyanti	PO Bus Dewi Sri (Anak Ismail dan Rokhayah)	Bupati Brebes	2012- 2016	-
13	Budi Budiman	Pengusaha Group Mayasari, PO Bus Doa Ibu, Mal, dan Showroom	Walikota Tasikmalay a	2013- 2018	-
14	Dede Sudrajat	Pengusaha Otobus	Wakil walikota Tasikmalay a	2013- 2018	-
15	Abah Anton	Pengusaha Tetes Tebu	Walikota Malang	2013- 2018	-

16	Mustofa Kamal Pasa	Pengusaha Penggilingan Batu	Pasir	Pilbub Mojoekerto	2010- 2015	2016-2021
----	-----------------------	-----------------------------------	-------	----------------------	---------------	-----------

Sumber: Ira Permata Sari (2014)

Data tersebut telah menunjukkan betapa besar minat para pengusaha ditingkat daerah untuk dapat berkiperah dalam dunia politik. Sedikitnya terdapat dua jalan yang dapat ditempuh oleh pengusaha untuk masuk dalam dunia politik. *Pertama*, mereka memilih terjun langsung dalam dunia politik dengan mencalonkan diri dalam pemilu baik Pileg, Pilpres, maupun Pemilukada. *Kedua*, mereka memilih di belakang layar yaitu sebatas mendukung pasangan calon tertentu dalam Pemilu. Mereka berperan sebagai tim sukses, penyanggand dana, sponsor atau sebagai broker.

Jenis pengusaha yang pertama inilah yang kerap yang sangat mendapat perhatian. Sosok mereka yang berada di depan layar menjadikan posisi mereka pusat diperhatikan. Sejatinya dalam beberapa kasus sosok pengusaha semacam ini memiliki pengaruh yang kuat dalam politik kita. Ketika banyak pengusaha menjatuhkan pilihan untuk tampil di belakang layar dalam bursa politik kita bukan berarti pengusaha yang terlibat langsung tidak memiliki tujuan politik. Hal ini membuktikan bahwa kajian politik terkait dengan keterlibatan langsung pengusaha dalam dunia politik masih cukup sempit. Artinya ada fenomena lain yang luput dari perhatian khalayak umum terkait dengan persoalan keterlibatan langsung pengusaha dalam dunia politik. Untuk itu penelitian mengenai keterlibatan langsung pengusaha dalam dunia politik diberikan warna baru dengan menggeser kajian pada para pengusaha yang bermain dalam ranah politik dengan cara berdiri di belakang layar. Berangkat dari argumentasi tersebut, penulis pada akhirnya memilih untuk melihat pengusaha di Kabupaten Wakatobi yang memiliki

pengaruh kuat dalam politik dan pemerintahan di Kabupaten Wakatobi. Seperti pada tabel di bawah ini oligarki dan elite ekonomi di Kabupaten Wakatobi:

Tabel 3. Profil Oligarki dan Elite Ekonomi di Wakatobi

Nama	Latar Belakang	Grup Bisnis/ Tahun pendirian	Bisnis/ Proyek Yang Di kelola	Sumber Daya Kekuasaan	Kewarga negaraan	Harta/ Kekayaa/ Pendapatan	Ket.
Hugua	Aktivis	Patuno Resort & PT. Patua Insani Sapulo (Pata Pulo Travel)	Pariwisata (resort & penyeleman) dan Travel	Hak politik dan ekonomi (memilih/ dipilih, investasi)	Indonesia	Tidak diketahui	Aktivis yang bertransformasi menjadi elite politik dan elite ekonomi, lalu menjadi Oligarki
				Jabatan resmi (Bupati Wakatobi 2006-2011, 2011-2016; Ketua DPD PDI.P Sultra)			
				Kekuasaan pemaksaan (pajabat negara/aparat negara 2006-2016)			
				Kekuasaan mobilisasi (aktivis sosial/LSM/t okoh partai)			
Kekuasaan material (Pemilik Patuno Resort & Pata Pulo Travel)							

Lorenz Mader	Pengusaha	Wakatobi Dive Resort/1995	Pariwisata (resort dan penyelaman)	Hak ekonomi (investasi)	Swiss	Pendapata WDR sebesar 64,8 Milyar Rupiah/ Tahun (data tahun 2007).	Elite ekonomi
				Jabatan resmi (pemilik Wakatobi Dive Resort)			
				Kekuasaan material (Pemilik Wakatobi Dive Resort)			
Arhawi	Pengusaha	PT. Askar Saputra	Transportasi (Kapal Laut)	Hak politik dan ekonomi (memilih/ dipilih, investasi)	Indonesia	Rp.44.150.947.948 (LHKPN Tahun 2015).	Pengusaha yang bertransformasi menjadi elite politik dan menjadi Oligarki
				Jabatan resmi (Wakil Bupati Wakatobi 2011- 2016, Bupati terpilih Wakatobi terpilih 2016-2021; Ketua DPD PAN Wakatobi, CEO Aksar)			
				Kekuasaan pemaksaan (pejabat negara/aparaturnegara 2011-2021)			
				Kekuasaan mobilisasi (tokoh partai)			

				Kekuasaan material (Pemilik Grup Aksar)			
Ceng Ceng	Pengusaha	PT. Golden /Prima Wakatobi Kontraktor& Tunas Mandiri	Infrastruktur (jalan yang didanai APBD dan perluasan Apron dan Taxiway termasuk Marking Bandara Matohara	Hak ekonomi (investasi)	Indon esia	Tidak diketahui	Elite ekonomi
				Jabatan resmi (pemilik Golden Prima Wakatobi & Tunas Mandiri)			
				Kekuasaan material (Pemilik Golden Prima Wakatobi & Tunas Mandiri)			
Haliana	Pengusaha	CV.Liya Persada (Kontraktor), UD Rezky Abadi (Perdagangan Umum), PT. Tomia Bersinar (SPBN/PERT A MINA), Pudonggala Damai Bersinat (Transportasi Laut), Anggota plasma pada PT. Agrosawit Indonesia (Perkebunan Kelapa Sawit)		Hak ekonomi	Indon esia	Rp.31.608.292.298948 (LHKPN Tahun 2015).	Elite ekonomi yang berusaha menjadi elite politik namun gagal (tidak terpilih)
				Hak politik			
				Kekuasaan material			

Baharudi in dan Isa	Prmulik Tanah Dan mantan Birokrat		Pihak yang memfasilitasi Lorenz	Hak ekonomi	Indon esia	Tidak di ketahui	Mantan birokrat yang bertransformasi menjadi elite ekonomi dan memiliki pengaruh politik (anaknya terpiluh menjadi anggota DPRD)
				Hak politik			
				Kekuasaan material			
			menyewa Pulau One Mobaa				

Sumber: Eka Suaib, La Husen Zuada, Waode Syifatu, *Decentralization And Oligarchy Predator In Wakatobi: The Role Of Oligarchy's And Elite's Strategic In Rural*, 2016

Bedasarkan tabel di atas munculnya jenis pengusaha yang terlibat langsung dalam dinamika politik Kabupaten Wakatobi telah menjadi sebuah fenomena yang menarik untuk diteliti. Kabupaten Wakatobi yang pada akhirnya melatar belakang penulis mengambil tema penelitian ini, pada Pilkada tahun 2015 di Kabupaten Wakatobi terjadi pertarungan 2 kadidat yang berasal dari kalangan pengusaha dimana calon nomor urut satu (2) H. Arhawi Ruda – Ilmiati Daud yang diusung oleh partai PAN, Golkar, Garindra, Hanura, PKS, PKB, dan PBB dan berdasarkan observasi lapangan pasangan calon nomor urut satu membangun jaringan dengan masyarakat dengan usaha yang dimilikinya dimana sebelum pemilihan H. Arhawi bekerja sama dengan saudaranya H. Alida yang merupakan seorang pengusaha kapal, mereka menyediakan kapal untuk mengangkut mahasiswa yang ada di Kendari dan Bau-Bau secara gratis asalkan mahasiswa yang naik kapal itu harus memiih pasangan nomor urut 2 (H. Arhawi-Ilmiati Daud). Selain itu juga H. Arhawi memberikan kartu bersinar kepada pendukungnya gunanya yaitu

jika orang tersebut naik kapalnya maka akan dikenakan potongan harga yang biasanya harga tiket Rp 198.000 untuk tujuan Wanci – Kendari dan Kendari – Wanci, dengan kartu bersinar tersebut kita hanya membayar Rp 100.000 atau bisa juga tidak membayar tergantung dari penerima kartu bersinar itu.

Selain itu juga Pasangan nomor urut dua (1) Haliana - Syahwal yang diusung oleh partai PDIP, Demokrat dan PPP yang juga merupakan seorang pengusaha, dia juga menyediakan kapal untuk mengangkut mahasiswa yang ada di Kendari dan Bau-Bau namun kapal yang dipakai adalah kapal barang sehingga kebanyakan mahasiswa lebih memilih untuk naik kapal yang dimiliki oleh H. Arhawi dan H. Alida selain itu juga dia menyediakan aspal untuk perbaikan jalan raya penghubung Desa Bente dan Pada Raya Makmur dan dia juga membangun saluran air bersih untuk desa desa yang kekurangan air bersih antara lain di Desa Maleko, Desa Pookambua, Desa Posalu yang ada di Kecamatan Wangi-Wangi yang masih kekurangan air bersih selain itu juga dia memberikan sumbangan untuk pembangunan Mesjid di Desa Waha Kecamatan Wangi-Wangi.

Munculnya pengusaha-pengusaha dalam kontestasi politik Kabupaten Wakatobi bukanlah tanpa alasan yang kuat. Kabupaten Wakatobi adalah salah satu kabupaten yang memiliki potensi besar untuk berkembang. Kabupaten Wakatobi disinyalir akan mengalami peningkatan pembangunan dalam berbagai sektor. Peluang pembangunan ekonomi semakin terbuka sektor perekonomian mulai seimbang antara beberapa sektor. Tidak lagi bertumpu secara penuh pada sektor perikanan, dan pariwisata dalam hal ini adanya potensi peluang ekonomi pada sector transportasi jasa laut. Kabupaten Wakatobi yang sering disebut Kepulauan Tukang Besi yang terdiri dari 4 pulau dan 8 kecamatan yang 97% wilayah tersebut berupa

laut, sisanya 3% persen daratan dan dalam rapat paripurna DPRD tanggal 13 november 2017 bupati Wakatobi H. Arhawi, SE. mengatakkan bahwa total APBD tahun 2017 sebesar 721 Miliar.

Kabupaten Wakatobi memiliki potensi besar dalam pengembangan jasa transportasi laut dan Pengembangan Pariwisata. Kondisi ini sangat memungkinkan adanya peningkatan penanaman modal di Kabupaten Wakatobi sehingga membuka peluang masuknya kalangan pengusaha. Perkembangan ekonomi Kabupaten Wakatobi yang membaik menjadi salah satu peluang ekonomi bagi para pengusaha untuk meningkatkan keuntungan materiil mereka. Dibangunnya relasi dengan pemerintah kemudian menjadi penting untuk masuk dalam lingkungan ekonomi di daerah tersebut. Bahkan Indonesia Corruption Watch mencatat bahwa 70% anggota HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) memiliki akses terhadap APBN dan APBD. Sementara itu, pemilukada banyak dipilih oleh pengusaha sebagai pintu masuk ke dalam lingkungan politik. Dari banyak penelitian menyimpulkan bahwa tingginya biaya Pemilu-kada menjadi faktor utama masuknya kalangan pengusaha ke dalam politik. Relasi kemudian terbangun antara pengusaha dan penguasa yang memiliki motif yang berbeda namun saling menguntungkan sehingga membentuk sebuah hubungan timbal balik yang bersifat mutualisme. Karena sifatnya hanya sebagai pintu masuk maka relasi antara pengusaha dan penguasa kemudian terjalin secara berkelanjutan. Artinya proses ini tidak berhenti ketika Pemilu-kada berakhir, namun terus berlanjut dan dipelihara oleh masing-masing pihak untuk melindungi kepentingan masing-masing.

Keberlangsungan hubungan tersebut kemudian membentuk sebuah relasi yang cenderung mengarah pada relasi patronase. Selain membentuk sebuah oligarki politik, relasi antara bisnis dan politik di Indonesia juga banyak terjalin dalam sebuah relasi

patronase. Penelitian terbaru Muhammad Kamil (2015) misalnya melihat relasi antara relasi kuasa antar elite dalam kebijakan reklamasi Teluk Benoa Tahun 2013-2015 relasi patronase ini terjadi didasari oleh kepemilikan sumber daya yang tidak seimbang antara keduanya sehingga dibutuhkan untuk menjalin relasi guna melengkapi kebutuhan masing-masing pihak. Konsep patronase secara sederhana dimaknai sebagai sebuah relasi yang mendudukan salah satu pihak sebagai patron dengan posisi yang lebih tinggi dan pihak lainnya menjadi klien yang memiliki posisi di bawahnya. Dalam konteks pengusaha dan penguasa di Kabupaten Wakatobi kasus seperti ini terjadi manakala terlihat adanya kecenderungan aktor pengusaha lebih kuat dibandingkan dengan penguasa. Sehingga relasi tersebut memiliki kecenderungan dengan relasi patronase.

Hal ini diperkuat dengan fakta menarik terkait dengan adanya upaya dari banyak pengusaha menjalin relasi dengan pemegang kekuasaan kepala daerah. Sehingga dalam studi ini penuli scenderung menggunakan istilah pengusaha. Relasi ini terjalin menjadi sebuah jaringan patronase yang berkembang dan melibatkan banyak aktor. Hubungan timbal balik yang dilandasi oleh motif ekonomi dan politik menjadi sebuah fenomena menarik yang bias dikaji dari penelitian ini. Terlebih lagi dengan segala upaya yang dilakukan untuk memelihara jaringan tersebut. Dari pemaparan tersebut pada akhirnya peneliti tertarik unuk mengetahui bagaimana bentuk relasi antara pengusaha dengan penguasa dalam politik khususnya proses dan pasca Pilkada di Kabupaten Wakatobi. Serta lebih jauh perlu diketahui pula bagaimana relasi ini bekerja untuk memenuhi kebutuhan masing masing pihak dan untuk memelihara relasi antara keduanya.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang tersebut, studi ini bermaksud untuk menjawab pertanyaan tentang:

1. Bagaimana hubungan calon Bupati nomor urut dua dengan pengusaha pada proses Pilkada di Kabupaten Wakatobi tahun 2015?
2. Bagaimana hubungan Bupati dengan pengusaha pasca Pilkada di Kabupaten Wakatobi tahun 2015?

C. Manfaat Penelitian

Sementara itu manfaat yang diharapkan dapat dihasilkan dari studi ini adalah:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam kajian tentang politik lokal, relasi bisnis dan politik, desentralisasi, serta demokrasi lokal dan Pemilukada.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada setiap pembaca terkait praktiknya yang terjadi dalam relasi antara pengusaha dan penguasa di tingkat daerah Kabupaten Wakatobi.

Bab 2

Kajian Pustaka

A. Konsep Elite Politik

Di dalam kehidupan bermasyarakat dapat ditemukan adanya perbedaan di antara umat manusia satu dengan yang lainnya. Perbedaan itu tidak hanya sebatas perbedaan yang bersifat fisik, tetapi juga perbedaan lainnya seperti bakat keterampilan dan kekayaan. Perbedaan tersebut dapat dinyatakan sebagai titik awal bagi munculnya kelompok-kelompok yang mempunyai keunggulan apabila dibandingkan dengan kelompok lainnya dalam suatu masyarakat yang sama. Anggota masyarakat yang mempunyai keunggulan pada gilirannya akan tergabung dalam suatu kelompok yang lebih dikenal dengan sebutan elite.

Secara etimologi kata elite berasal bahasa Latin “*Eligere*” yang berarti terpilih. Kata itu juga digunakan di Prancis pada abad ke XIV yang mengandung pengertian yakni memilih (Keller, 1995). Terminologi elite, sebagaimana diungkapkan oleh Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca, Suzanne Keller pemikir yang tergolong dalam elite theoritis memang menunjukkan pada kelompok atau golongan yang ada di suatu masyarakat yang memiliki keunggulan atau superioritas apabila dibandingkan dengan kelompok atau golongan yang lainnya (SP Varma, 2001).

Kata *elite* pada abad XVII digunakan untuk menggambarkan barang-barang dengan kualitas sempurna, penggunaan kata itu kemudian diperluas untuk merujuk kelompok-kelompok sosial yang unggul, misalnya unit-unit militer kelas satu atau tingkatan bangsawan yang tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka teori elite

memandang bahwa setiap masyarakat terbagi dalam dua kategori yang luas yaitu sekelompok kecil manusia yang berkemampuan dan karenanya menduduki posisi untuk memerintah dan sejumlah besar massa yang ditakdirkan untuk diperintah.

Mosca dan Pareto dalam (SP Varma, 2001) membagi stratifikasi masyarakat kedalam dua kategori yaitu:

1. Elite yang memerintah (*governing elite*). Kelas ini terdiri dari individu-individu yang secara langsung atau tak langsung mengendalikan dan memainkan peranan yang besar dalam pemerintahan seperti Gubernur, Bupati dan Walikota, Pimpinan DPRD, para anggota DPRD, dan pemimpin-pemimpin partai politik.
2. Elite yang tidak memerintah (*non-elite*). Kelas ini terdiri dari individu-individu di luar sirkulasi pemerintahan seperti elite keagamaan, pengusaha, elite organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan serta profesi dan lain sebagainya.

Pada tataran konsep klasik, elite oleh Pareto dan Mosca telah dikaitkan dengan pengertian kelompok orang-orang secara langsung atau karena posisinya sangat kuat pengaruhnya dalam menjalankan kekuatan politik. Mereka juga mengakui bahwa elite yang memerintah itu merupakan kelas politik dan kelompok sosial yang terhormat yang oleh Pareto disebut sebagai aristokrasi.

Elite sering diartikan sebagai individu-individu yang superior, yang berbeda dengan massa yang menguasai struktur dan jaringan-jaringan kekuasaan atau kelompok-kelompok sosial yang berada dalam lingkaran kekuasaan maupun yang sedang melaksanakan kekuasaan. Menurut Pareto menyebutkan bahwa elite politik terdiri dari dua komponen yaitu:

1. Elite Politik Lokal merupakan individu-individu yang menduduki jabatan politik (kekuasaan) di eksekutif dan legislatif yang

dipilih melalui pemilu dan dipilih dalam proses yang demokratis di tingkat lokal. Mereka yang menduduki jabatan politik tinggi di tingkat lokal yang membuat kebijakan-kebijakan politik. Elite politik itu seperti: Gubernur, Bupati dan Walikota, Pimpinan DPRD, para anggota DPRD, dan pemimpin-pemimpin partai politik.

2. Elite Non-Politik Lokal adalah seseorang atau individu yang menduduki jabatan strategis dan mempunyai pengaruh untuk memerintah orang lain dalam lingkup masyarakat. Elite non-politik ini seperti: elite keagamaan, elite organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan serta profesi dan lain sebagainya.

Menurut Pareto dan Mosca secara prinsip mereka menyatakan pendapat bahwa di setiap sistem masyarakat baik struktur masyarakat yang masih bersifat tradisional ataupun tatanan masyarakat modern, pasti ditemukan sekelompok kecil minoritas individu yang memerintah anggota masyarakat lainnya.

Elite berdasarkan kajian teoritis yang dibangun awal-awalnya oleh Mosca dalam *The Ruling Class*, Pareto, dan Michels (Mas'ood dan Colin, 1986) mempunyai beberapa prinsip umum yaitu:

1. Adanya kekuasaan politik, seperti juga barang-barang sosial lainnya didistribusikan dengan tidak merata. Gagasan Pareto tentang orang berdasarkan pemilikan akan barang yang berwujud kekayaan, kecakapan atau kekuasaan politik merupakan hal yang menunjukkan prinsip itu.
2. Secara umum masyarakat dikategorikan ke dalam dua kelompok, mereka yang memiliki kekuasaan politik penting dan mereka yang tidak memilikinya.
3. Elite bersifat homogen, bersatu, dan memiliki kesadaran kelompok. Elite itu bukan merupakan penjumlahan orang saja tetapi individu yang berada dalam komunitas elite itu saling

mengenal satu dengan yang lainnya, memiliki latar belakang yang sama (walaupun memiliki pandangan yang berbeda), memiliki nilai-nilai yang sama dan kepentingan yang sama, dan anggotanya berasal dari satu lapisan masyarakat yang sangat terbatas.

4. Elite mengatur sendiri kelangsungan hidupnya dan anggotanya berasal dari satu lapisan masyarakat yang sangat terbatas.
5. Elite bersifat otonom dan kebal akan gugatan dari siapapun yang di luar kelompoknya mengenai keputusan-keputusan yang dibuatnya. Semua persoalan politik penting diselesaikan menurut kepentingan atau tindakan kelompok.

Elite dalam (Dhuroddin Mashad, 2005:12-13) sering diartikan sebagai sekumpulan orang sebagai individu yang superior, yang berada dengan massa yang menguasai jaringan-jaringan kekuasaan adalah kelompok yang berada di lingkaran kekuasaan maupun yang sedang berkuasa.

Karl Menheim berbeda dengan Pareto dan Mosca dalam membedakan tipe elite (Suzzane Keller, 1995:17). Menurutnya ada dua tipe elite yang berbeda secara prinsipil yaitu:

1. Elite integratif, yang terdiri dari para pemimpin politik dan organisasi. Elite integratif mempunyai fungsi pokok yaitu mengintegrasikan sejumlah besar kehendak-kehendak perse-orangan. Elite *integrative* berkerja melalui organisasi-organisasi politik formal.
2. Elite sublimatif yang terdiri dari para pemimpin moral-ke-agamaan, seni dan intelektual. Fungsi pokok dari elite sublimatif adalah mengadakan sublimasi tenaga kejiwaan manusia. Elite sublimatif bekerja melalui saluran-saluran yang lebih informal seperti golongan-golongan dan faksi-faksi.

B. Konsep Pemilihan Umum Kepala Daerah Langsung

Pemilukada tahun 2015 di Kabupaten Wakatobi merupakan pengalaman politik bagi masyarakat, untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung. Di dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pemilihan umum Kepala Daerah dimasukkan pada rezim Pemilu. Maka kemudian masyarakat mengenal istilah pemilihan kepala daerah dengan sebutan Pilkada. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagai awal dari pemilukada langsung di Indonesia sejak tahun 2005 (Kurde, 2005:104).

Masyarakat pada konteks kekinian sudah tidak asing lagi dengan proses pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung. Menurut R. William Liddle dalam (Toni A. Pito, 2006) bahwa Pemilu adalah sebagai penghubung antara prinsip kedaulatan dan praktik pemerintahan oleh sejumlah elite politik.

Ditinjau dari perspektif konsep desentralisasi dan aplikasi demokrasi prosedural, sistem pemilihan umum kepala daerah secara langsung merupakan sebuah karya inovasi yang bermakna dalam proses konsolidasi demokrasi pada level lokal secara kontinuitas.

1. Defenisi Pemilihan Kepala Daerah Langsung

Pembelajaran demokrasi politik di Indonesia sebelum masa kemerdekaan sampai dengan saat ini, masih dalam tahap penyempurnaan. Dalam hal ini keterkaitan dengan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di daerah secara langsung. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pasal 1 menyatakan bahwa pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pe-

milihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi, kabupaten dan kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk memilih pemimpin yang demokratis.

Pemilihan kepala daerah langsung yang termaktub dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah sebuah proses demokratisasi di Indonesia untuk memilih pemimpin oleh masyarakat daerah setempat yang memenuhi syarat.

2. Tujuan Pemilihan Kepala Daerah Langsung

Pemilihan kepala eksekutif daerah didasarkan pada demokrasi lokal partisipatif, dimana rakyat di daerah yang bersangkutan melakukan pemilihan secara langsung. Pada dasarnya pemilukada langsung bertujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah dan membentuk pemerintahan yang bernuansa demokratis, kuat, dan memperoleh legitimasi rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Memilih pemimpin yang berkualitas secara damai, jujur, dan adil selain mengoptimalkan demokratisasi daerah serta akses dan kontrol masyarakat untuk partisipatoris dalam proses-proses kebijakan.

Dari sisi kedaulatan rakyat, demokrasi lokal dibangun untuk memberikan porsi yang seharusnya diperoleh rakyat lokal dalam pemberian legitimasi pada elite eksekutifnya. Selama ini, rakyat daerah memberikan kedaulatan hanya pada legislatif daerah saja melalui pemilu legislatif.

C. Penelitian Relevan

Beberapa hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Robison (dalam Vedi Hadiz, 2005:119-120) menjelaskan bahwa para jendral yang memiliki kedekatan khusus dengan Soeharto menguasai beberapa urusan penting pemerintahan. Seperti misalnya pengelolaan kehutanan, Bulog, perdagangan, dan pertamina. Para birokrat politik ini membentuk suatu *link* dan kerjasama dengan para pengusaha berupa kontrak-kontrak, lisensi, kredit bank negara, dan lain-lain. Hubungan ini bersifat simbiosis dimana para birokrat memberi jalan pengusaha untuk mengakses ekonomi dari sumber-sumber negara, di sisi lain para pengusaha menyediakan dana untuk kepentingan politik para birokrat. Tidak hanya Soeharto bahkan para pejabat di sekitar Soeharto kemudian juga membentuk keluarga bisnis dan politik untuk mencapai keuntungan dari sumber-sumber negara. Robison menyebutkan beberapa nama diantaranya adalah Mantan Dirut Pertamina Ibnu Sutowo dan Setneg Ginandjar Kartasmita. Meskipun tak sepopuler keluarga Cendana (keluarga Soeharto) namun mereka juga membentuk keluarga bisnis politik seperti Soeharto (Hadiz, 2005). Praktik oligarki mengalami masa kejayaan pada tahun 1986 dan seterusnya mereka mengamankan bisnis-bisnisnya melalui permainan kebijakan oleh negara. Misalnya kebijakan untuk mencabut monopoli impor dan memacu sektor ekspor. Monopoli sektor publik dalam hal pembangkit daya, jalan raya, pelabuhan, dan telekomunikasi. Vedi mengungkapkan bahwa “sektor-sektor ekonomi penting tetap kebal dari deregulasi. Sektor-sektor ini sering kali adalah sektor-sektor di mana para konglomerat dan keluarga-keluarga bisnis-politis memiliki operasi-operasi mereka yang paling menguntungkan” (Hadiz, 2005:123- 124).
2. Jeferry Winters (dalam Michele Fordand Thomas B. Pepinsky (ed), 2014) secara ringkas juga menjelaskan tentang kondisi

oligarki yang dibangun pada masa Soeharto dan bagaimana kondisinya pasca turunnya Soeharto yakni pada era reformasi seperti saat ini. Hasil studi Winters meunjukkan bahwa pasca Orde Baru kelompok oligarki di Indonesia didominasi oleh kalangan pengusaha dari perusahaan media. Mereka membangun aliansi dengan partai politik tertentu. Bahkan sebagian dari mereka dengan kekayaan yang dimiliki telah membangun sendiri partai politiknya. Oligarki pada era reformasi sedikit memiliki perbedaan dengan oligarki pada masa Soeharto. Saat ini praktik oligarki marak ditemukan dalam proses elektoral. Berbagai praktik relasi yang terbangun antara pengusaha dan politik menjelma pada berbagai bentuk dan dilatarbelakangi oleh berbagai faktor pemilukada menjadi lahan yang paling basah bagi tumbuh suburnya oligarki. Mahalnya biaya politik dalam pemilukada, pergeseran perilaku politik masyarakat dari idealis menuju sikap yang pragmatis, dan berubahnya sistem pemilu yang menganti sistem proposional tertutup menjadi sistem proposional terbuka, serta pemilihan kepala daerah oleh DPR berubah menjadi Pemilukada langsung mengakibatkan tingkat kompetensi antara pasangan semakin tinggi kondisi ini secara langsung berpengaruh pada strategi pemenangan para kandidat.

3. Edward Aspinal dan Mada Sukmajanti (2015) secara komprehensif menjelaskan bagaimana relasi antara pengusaha dan politisi terjalin melalui sebuah hubungan patronase dan klientelisme dalam proses elektoral. Kedua istilah ini sering kali digunakan secara bergantian. Namun secara teoritis Edward Aspinal dan Mada Sukmajanti dalam studinya tentang politik uang di Indonesia berusaha memberikan perbedaan dari keduanya. “Patronase dimaknai sebagai sebuah hubungan yang me-

rujuk pada materi atau keuntungan lain yang didistribusikan oleh politisi kepada pemilih atau pendukung. Sementara klien-telis memerujuk pada karakter relasi antara politisi dan pemilih atau pendukung.” Dalam Pemilu-kada relasi patronase yang paling umum adalah terjalin dalam proses pemberian suara, pemberian pemberian pribadi, pelayanan dan aktivitas, barang-barang kelompok, *park barrel project*. Sementara kleintelisme banyak ditemukan dalam hubungan mobilisasi pemilih dalam bentuk tim sukses dan mesin-mesin jaringan sosial serta partai politik. Tidak hanya pada pemilu-kada, patronase dan klien-telisme juga terjadi pada pemilihan legislatif (Pileg).

4. Ibrahim (2015) M. Mahsun (2015) Gandung Ismanto dan Idris Toha (2015) Caroline Pascarina (2015) Marzuki Wahid (2015) Rubaidi (2015) dan Rudi Rohi (2015). Studi tersebut menyajikan fakta bahwa praktik patronase dan klientelisme tumbuh subur dan menjadi trend baru dalam Pemilu kita. Patronase di-tekankan pada beberapa kegiatan yang banyak ditemukan adalah praktik pemberian sembako, sumbangan untuk pemba-ngunan infrastruktur, dan bentuk pemberian barang yang lain-nya. Sementara klientelisme dibentuk dalam rangka melakukan mobilisasi politik dengan pembentukan jaringan tim sukses yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Tim sukses tersebut terdiri dari tim dari partai politik, broker, dan para relawan. Berbeda dengan patronase yang hanya bersifat sementara, arti-nya masyarakat diberikan barang atau sumbangan kemudian mereka diminta untuk memberikan suaranya pada saat Pemilu. Dan hubungannya tidak berlanjut setelah Pemilu selesai. Klien-telisme lebih bersifat berkesinambungan, artinya jaringan ini akan tetap terjalin hingga para Caleg tersebut duduk pada kursi legislatif. Misalnya pemberian proyek atau penyaluran dana

aspirasi yang menguntungkan para tim sukses (Edward Aspinal dan Mada Sukmajanti (ed), 2015).

5. Ahimsa Putra (1988). Dengan menggunakan teori patronase dari Jame Scout dan menambahkannya dengan perspektif keadaan dan budaya Ahimsa menjelaskan tentang relasi patron klien di Sulawesi Selatan. Penelitian ini lebih fokus pada hubungan patronase yang lebih banyak dipengaruhi adanya kondisi budaya yang mendukung tumbuh dan berkembangnya hubungan ini. Lebih jauh dari hubungannya dengan proses elektoral pembahasan mengenai relasi antara pengusaha dan calon kepala daerah dalam pemilu sangat erat kaitannya dengan proses demokrasi ditingkat lokal. Desentralisasi secara langsung berdampak pada semakin beragamnya dinamika demokrasi di tingkat lokal yang hadir dalam berbagai praktik politik dan pemerintahan.

Penelitian ini kemudian berupaya memberikan suatu kebaruan dan sumbangan pemikiran yang membedakannya dengan penelitian sebelumnya. Sedikitnya terdapat tiga hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. *Pertama*, penelitian ini berupaya mengungkap relasi baru dalam patronase yang selama ini bersifat hirarkis menuju suatu hubungan yang lebih bersifat transaksional.

Penelitian sebelumnya tentang patronase dan klientelisme banyak menempatkan posisi penguasa sebagai patron dan pengusaha sebagai klien. Sementara studi ini berupaya menunjukkan fakta perkembangan dinamika politik di ranah lokal yang tidak lagi menempatkan penguasa sebagai patron dan pengusaha sebagai klien. Posisi patron bisa ditempati oleh pengusaha dengan kekuatan modal yang ia miliki. Namun, klien dalam studi ini juga memiliki nilai tawar yang tinggi sehingga relasi patronase lebih bersifat

transaksional. Meskipun demikian kajian ini tetap tidak menghilangkan logika awal hubungan patronase yang menitik beratkan pada hubungan yang tidak seimbang yang disebabkan oleh perbedaan kedudukan antara patron dan klien. *Kedua*, dalam sudut pandang demokrasi lokal penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana elite berupaya membajak praktik demokrasi. Jika penelitian sebelumnya banyak fokus pada aktor elite pemerintahan maka penelitian ini berupaya melihat relasi antara aktor pemerintahan dalam hal ini calon kepala daerah dengan aktor non pemerintahan yakni pengusaha yang melakukan relasi untuk membajak praktik demokrasi melalui pemilukada. Sehingga penekanan dari studi ini yakni pada relasi di antara keduanya, tidak hanya fokus pada salah satunya. *Ketiga*, berbeda dengan patrimonialisme yang menekankan pada pengaruh struktural dan kultural dalam memandang relasi pengusaha dan politik. Studi ini tidak berusaha mengaitkan relasi tersebut dari adanya pengaruh kultural. Hal ini dikarenakan secara kultur budaya bapakisme dan patrimonialisme sudah tidak lagi sepenuhnya relevan. Kajian ini tidak serta merta memosisikan pengusaha sebagai klien dari penguasa sehingga menempatkannya dalam hubungan hirarkis. Akan tetapi lebih menekankan adanya hubungan yang saling membutuhkan yang dilandaskan pada pertimbangan yang sangat rasional yakni pertimbangan keuntungan yang akan didapat oleh keduanya. *Keempat*, studi ini tidak sepenuhnya mengarah pada adanya praktik *shadow state* pada praktik pemerintahan di Kabupaten Wakatobi. Dikarenakan posisi pengusaha tidak serta merta mengambil/membajak proses pemerintahan di sana. Adanya campur tangan kepala daerah yang cukup besar dalam relasi ini menunjukkan bahwa negara secara formal tetap hadir dalam proses pemerintahan. Tidak sepenuhnya aktor informal yang melaksanakan pemerintahan. *Kelima*, studi ini telah menggunakan pintu

masuk Pemilukada untuk membaca relasi antara pengusaha dan penguasa di Kabupaten Wakatobi. Akan tetapi secara lebih jauh studi ini juga telah melihat bagaimana relasi ini bekerja dalam kesehariannya terlepas dari momen Pemilukada yang telah berlangsung. Bagaimana jaringan ini berkembang dan bekerja untuk memelihara jaringan tersebut lebih banyak dibahas dalam studi ini.

D. Alur Pemikiran

Hubungan penguasa (bupati) dengan pengusaha pra dan pasca Pemilukada Wakatobi mesti dipahami dari berbagai dimensi untuk dapat melihat motif-motif kepentingan. Untuk mendapatkan akses kenegaraan dan mempengaruhi keputusan politik. Dengan mempelajari dunia penguasa dengan kelompok pengusaha dalam politik praktis dapat diperoleh pandangan mengenai distribusi kekuasaan serta realisasi kepentingan dalam pertukaran. Pada setiap suksesi politik, ketika pesta demokrasi itu sarat akan kepentingan yang melingkupinya dan menjadikan arena investasi yang tidak pernah sepi dari problematik relasi penguasa-pengusaha. Penguasa sedemikian rupa mengondisikan agar jejaring kekuasaan menjadi tempat bersimbiosis kalangan pengusaha.

Kuatnya persekutuan pengusaha dan penguasa menjadi semacam kekuatan yang begitu sulit ditaklukkan, menyadari bahwa paduan kekuatan semacam itu akan lebih banyak berasosiasi, atau setidaknya dikaitkan dengan dunia kekuasaan dan bisnis. Pada dasarnya, faktor interelasi elite dilandasi oleh transaksi kepentingan-kepentingan yang menjadi substansi untuk dipertukarkan di setiap interaksi sosial politik. Dalam hubungan sosial politik yang mendominasi pertukaran adalah perilaku elite yang mempertukarkan kepentingan dan saling ketergantungan di antara aktor-aktor politik.

James S. Coleman memandang seorang aktor dipandang

sebagai manusia yang mempunyai tujuan maupun maksud. Oleh karena aktor tersebut mempunyai tujuan, maka tindakannya pun terpengaruh pada upaya pencapaian kepentingan tersebut. Sehingga dalam berinteraksi, yang akan tercapai adalah suatu kepuasan dan kenikmatan dalam hubungan politik yang mendatangkan keuntungan kedua belah pihak (Ritzer & Goodman, 2004:357).

Peter M. Blau (Bernard Raho:176) menjelaskan pertukaran sosial terbatas kepada tingkah laku yang mendatangkan imbalan, yakni tingkah laku yang akan berhenti kalau tidak bakal ada imbalan lagi dan orang-orang tertarik kepada satu sama lain karena bermacam-macam alasan yang memungkinkan mereka membentuk atau membangun asosiasi atau organisasi sosial. Begitu ikatan awal sudah terbentuk maka imbalan yang mereka berikan kepada satu sama lain berfungsi untuk mempertahankan dan menguatkan ikatan itu. Sebaliknya imbalan yang tidak seimbang akan memperlemah bahkan menghancurkan asosiasi itu.

Dalam perspektif patron-klien hubungan itu merupakan proses tukar menukar jasa. Dengan kata lain kedua belah pihak terlibat dalam proses saling memberi dan menerima. Patron memberikan *resources* yang dimilikinya untuk dimanfaatkan para klien, dan para klien memberikan dukungan dan bantuan kepada patron. Polarisasi yang dilakukan penguasa dalam pendistribusian jabatan politik, memiliki motif keuntungan-keuntungan yang seimbang. Karena kekuasaan sifatnya tidak diperoleh secara sekuritas, maka menjadi perebutan berbagai kelompok elite, karenanya interelasi elite pasti akan terjadi.

Nuansa integrasi dalam sirkulasi elite, seyogianya menunjukkan tingkat elaborasi kepentingan. Dilihat dari tujuannya, hubungan penguasa dengan pengusaha yang menunjukkan adanya kepentingan untuk memperebutkan sumber ekonomi dan kekuasaan. Dalam

hal ini, kepentingan dapat digunakan sebagai cara untuk melihat perbedaan motif diantara kelompok pada jaringan pertukaran.

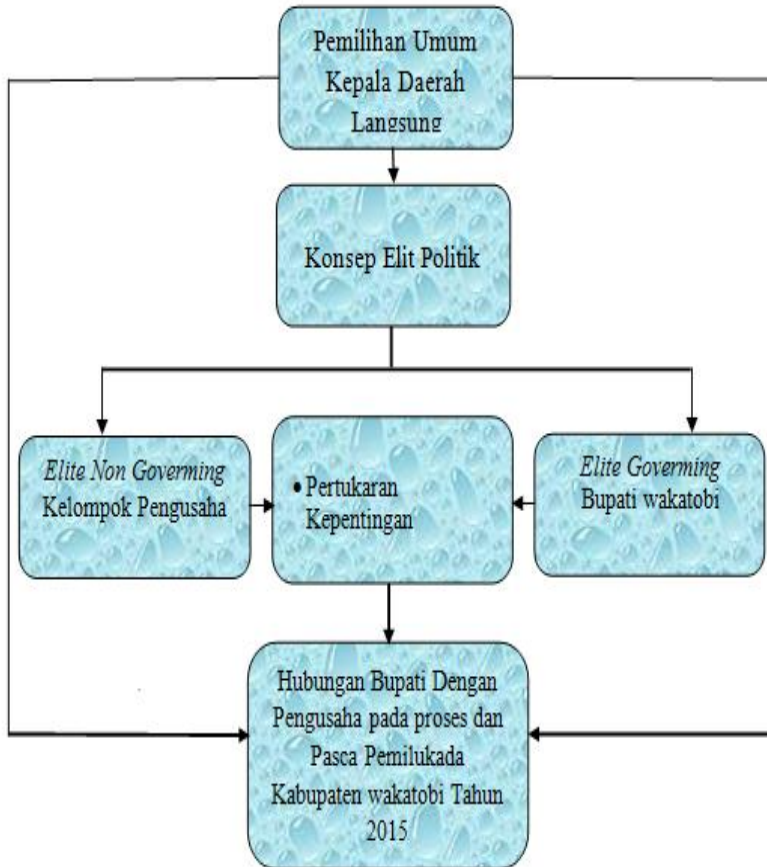
Dahrendorf dalam (Moch Nurhasim, 2005:14) mengatakan bahwa motivasi seseorang untuk mendapatkan kekuasaan, selain ingin berkuasa, mereka (elite) juga ingin memperbaiki kesejahteraan, jaringan, investigasi strategis, baik dari segi kultural, ekonomi, politik dan jaringan kekuasaan dan lain sebagainya. Karena pada umumnya, elite politik memiliki motif untuk menduduki jabatan-jabatan politik semacam itu.

Melalui peran pengusaha lokal maupun interlokal, menjadi corong dalam menjaring kekuatan bagi kandidat-kandidat dalam pemilihan kepala daerah di Wakatobi. Kekuatan dana sebagai senjata utama dari pengusaha, menjadi salah satu faktor pendorong menangnya pasangan kandidat bupati di Wakatobi. Para pengusaha ini memainkan peranan dalam mengusung dan mendukung kandidat menjadi satu gerbong dengan dibantu oleh tim sukses sebagai perpanjangan tangan dan tim kampanye kandidat. Dalam menelusuri perjalanan para pengusaha pendukung Bupati, tidak lepas dari sebuah hubungan timbal-balik atau balas jasa. Faktor kepentingan politik menjadi tujuan untuk memperoleh sebuah hadiah atau *reward*, bagi dukungan yang telah diberikan. Dari sudut pandang pengusaha, memberikan dukungan kepada kandidat tertentu diharapkan mampu memberi imbalan yang lebih besar.

Mosca dan Pareto dalam (Varma 1987:202) membagi stratifikasi masyarakat kedalam dua kategori yakni. Pertama, Elite yang memerintah (*governing elite*). Kedua, elite yang tidak memerintah (*non-elite*). Pengusaha dan elite politik lokal (bupati) pada umumnya memiliki tujuan dan kepentingan. Tujuan dan kepentingan yang dimaksud adalah kekuasaan dan imbalan (*reward*). Sehingga untuk menilai ukuran hubungan bupati dengan pengusaha pasca Pemilu-

kada di Kabupaten Wakatobi tampak meningkat dan merenggang tergantung pada realisasi pertukaran kepentingan.

Dengan melihat alur pemikiran yang diuraikan di atas maka alur pemikiran dapat digambarkan dengan skema hubungan sebagai berikut.



Hubungan penguasa dengan pengusaha dalam dunia politik sulit terpisahkan. Sebab baik calon bupati atau bupati maupun pengusaha saling membutuhkan untuk mendapatkan kepentingan

yang menguntungkan. Parameter (ukuran) hubungan yang terbangun di antara bupati dengan pengusaha setelah suksesi politik Pemilu-kada Kabupaten Wakatobi Tahun 2015. Meningkat atau menurunnya suatu hubungan politik tergantung dari keseimbangan antara apa yang diberikan ke dalam hubungan dan apa yang dikeluarkan dari hubungan itu, dan jenis hubungan yang dilakukan serta kesempatan memiliki hubungan yang lebih baik.

Dalam pertukaran kepentingan politik esensinya adalah untuk mendapatkan ganjaran atau *reward* (penghargaan) dari dalam hubungan yang sedang terjalin. Faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan adalah seberapa besar ganjaran atau imbalan yang diperoleh dari hubungan politik, dengan kata lain ada realisasi dan distribusi kepentingan untuk memenuhi tuntutan kelompok pengusaha atas tindakan dan kontribusinya pada proses politik.

Hubungan calon bupati dengan kelompok pengusaha dapat diinterpretasikan stabil apabila telah mendapatkan distribusi atau alokasi dari sumber-sumber bernilai yang seimbang atau ganjaran atas tindakan rasionalnya memberikan dukungan politik kepada bupati. Sebaliknya, jika ganjaran atau imbalan yang diharapkan tidak didapatkan dari proses kebijakan politik bupati maka hubungan itu akan berubah. Dan perubahan dalam hubungan tersebut akan melemahkan asosiasi penguasa-pengusaha yang mengarah pada pergeseran kepentingan dan berimplikasi terhadap relasi yang negatif.

Dalam menjaga hubungan yang stabil dan harmonis antara bupati dengan kelompok pengusaha pada proses dan pasca Pemilu-kada Kabupaten Wakatobi Tahun 2015. Maka dilakukan berbagai pertukaran kepentingan. Pertukaran adalah proses transaksi atau tukar-menukar jasa yakni pertukaran antara bupati (penguasa) dengan kelompok pengusaha yang telah berpartisipasi untuk mem-

berikan imbalan dan penghargaan sebagai konsesi secara timbal-balik yang menguntungkan.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab 3

Metode Penelitian

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Daerah yang menjadi objek penelitian adalah Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara. Pemilihan Kabupaten Wakatobi sebagai daerah penelitian berdasarkan pertimbangan bahwa lokasi penelitian ini termasuk daerah baru yang cukup dinamis untuk diteliti pasca Pemilu yang dilaksanakan pada tahun 2015. Selain alasan itu, Kabupaten Wakatobi juga cukup representatif untuk meneliti hubungan penguasa dengan pengusaha di daerah bupati terpilih. Dimana elite politik (bupati) dan pengusaha menjalin hubungan, baik pengusaha lokal maupun pengusaha inter-lokal yang berdomisili di luar Kabupaten Wakatobi. Selain perihal tersebut, peneliti juga mengenal sejarah, budaya serta adat istiadat yang ada di Kabupaten Wakatobi, sehingga dapat mempermudah akses untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan yakni bulan Januari sampai Februari tahun 2018.

B. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, sesuai dengan tujuan dan konseptualisasinya maka penulis menggambarkan secara lebih jelas dan mendalam untuk mengetahui tentang hubungan penguasa dengan pengusaha pada proses dan pasca Pemilu di Kabupaten Wakatobi. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif untuk memenuhi tujuan dan kerangka di atas. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan se-

jumlah variabel yang berkenaan dengan masalah yang sedang diteliti (Moleong, 2005:186).

Dasar penelitian ini adalah kualitatif yaitu tipe pendekatan dalam penelitian ditujukan pada beberapa individu dan kelompok. Fokus perhatiannya diarahkan pada variable tersebut mengingat unit yang ditelaah dalam jumlah besar yaitu individu dan kelompok yang diambil sebagai sampel yang bisa mewakili populasi individu atau sampel yang diteliti (representatif) sehingga bisa digunakan untuk tujuan-tujuan deskriptif.

C. Jenis Data

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui studi lapangan dengan menggunakan teknik wawancara. Dalam pelaksanaan teknik ini, penulis mengumpulkan data melalui komunikasi langsung dengan para *key* informan dan menggunakan beberapa alat untuk membantu dalam penelitian diantaranya adalah alat tulis, buku dan alat perekam. Informan yang dimaksud di sini adalah elite politik lokal yaitu bupati dan para pengusaha. Selain itu, wawancara juga dilakukan kepada beberapa tokoh masyarakat dan kepada sejumlah masyarakat di Kabupaten Wakatobi.
2. Data sekunder. Data sekunder yang dimaksudkan penulis yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca buku. Adapun beberapa buku yang sempat dibaca oleh penulis yaitu teori pertukaran sosial, teori pilihan rasional, ekonomi politik, kaitan penguasa dan kelompok elite; peran elite penentu masyarakat, elite dan masyarakat, pemelukada langsung, serta literatur-literatur dan informasi tertulis yang berkenaan dengan hubungan penguasa dengan pengusaha di daerah pra dan pasca

pemilihan umum Kepala Daerah di Kabupaten Wakatobi Tahun 2015, seperti beberapa informasi dari surat kabar dan tabloid seputar pemilihan bupati/wakil bupati di Kabupaten Wakatobi. Selain itu, juga terdapat situs-situs atau website yang diakses untuk memperoleh data yang lebih akurat.

D. Penentuan Informan

Menurut pendapat Spradley dalam Faisal (1990:45) informan harus memiliki beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan yaitu:

1. Subjek yang telah lama dan intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian dan ini biasanya ditandai oleh kemampuan memberikan informasi di luar kepala tentang sesuatu yang ditanyakan.
2. Subjek masih terikat secara penuh serta aktif pada lingkungan dan kegiatan yang menjadi sasaran atau penelitian.
3. Subjek mempunyai cukup banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai informasi.
4. Subjek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu dan mereka relatif masih lugu dalam memberikan informasi.

Penentuan informan dilakukan dengan secara sengaja (*pusposive sampling*) yaitu informan ditentukan berdasarkan tujuan dan kebutuhan peneliti, dengan pertimbangan bahwa informan mampu memberikan keterangan terhadap permasalahan yang diteliti dan berikut adalah beberapa informan yang terdiri dari penguasa dan beberapa pengusaha yang ada di Kabupaten Wakatobi. Sejumlah informan yakni:

1. H. Arhawi Ruda, SE.

Peneliti memilih informan tersebut karena beliau merupakan Bupati Kabupaten Wakatobi periode 2016-2021, pemenang Pemilu Kabupaten Wakatobi Tahun 2015 yang diusung oleh beberapa partai koalisi seperti PAN, Golkar, Gerindra, Hanura, PKS, PKB, dan PBB. Informan juga sebagai ketua dewan pembina PAN.

2. Luki Kusuma, SE.

Peneliti memilih informan tersebut karena beliau merupakan Kabag Ekonomi dan SDA yang ada di kantor pemerintah daerah di Kabupaten Wakatobi. Informan tersebut dianggap bisa memberikan gagasan dan input yang dibutuhkan oleh peneliti kaitan dengan data-data penelitian.

3. Usman, S.Pd.

Peneliti memilih informan tersebut karena beliau merupakan Kabag Pemerintahan Umum yang ada di kantor pemerintah daerah di Kabupaten Wakatobi. Informan tersebut dianggap bisa memberikan gagasan dan input yang dibutuhkan oleh peneliti kaitan dengan data-data penelitian.

4. H. La Pei

Informan tersebut merupakan pengusaha Kabupaten Wakatobi yang mendukung Paslon sekaligus adik dari bupati terpilih pada Pemilu Kabupaten Wakatobi Tahun 2015, dianggap kapabel dalam memberikan sumber informasi kaitan dengan data-data yang diperlukan dalam penelitian.

5. H. Harniati

Peneliti memilih informan tersebut karena kapasitasnya sebagai pengusaha yang energik di Kabupaten Wakatobi. Informan tersebut dianggap bisa memberikan gagasan dan input yang dibutuhkan oleh peneliti kaitan dengan data-data penelitian.

6. M. Ali Bunta

Peneliti memilih informan tersebut karena kapasitasnya sebagai pengusaha sekaligus tim sukses di Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi. Informan tersebut dianggap bisa memberikan gagasan dan input yang dibutuhkan oleh peneliti kaitan dengan data-data penelitian.

7. Ayudin

Peneliti memilih informan tersebut karena kapasitasnya sebagai pengusaha Kabupaten Wakatobi. Informan tersebut dianggap bisa memberikan gagasan dan input yang dibutuhkan oleh peneliti kaitan dengan data-data penelitian.

8. Sarman

Peneliti memilih informan tersebut karena kapasitasnya sebagai pengusaha sekaligus tim sukses di Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi. Informan tersebut dianggap bisa memberikan gagasan dan input yang dibutuhkan oleh peneliti kaitan dengan data-data penelitian.

9. Baharudin

Peneliti memilih informan tersebut karena kapasitasnya sebagai pengusaha muda Kabupaten Wakatobi. Informan tersebut dianggap bisa memberikan gagasan dan input yang dibutuhkan oleh peneliti kaitan dengan data-data penelitian.

10. Maenuru

Peneliti memilih informan tersebut karena kapasitasnya sebagai pengusaha Kabupaten Wakatobi. Informan tersebut dianggap bisa memberikan gagasan dan input yang dibutuhkan oleh peneliti kaitan dengan data-data penelitian.

11. H. Laode Panda

Peneliti memilih informan tersebut karena kapasitasnya sebagai pengusaha sukses Kabupaten Wakatobi. Informan tersebut di-

anggap bisa memberikan gagasan dan input yang dibutuhkan oleh peneliti kaitan dengan data-data penelitian.

12. H. Setiawati

Peneliti memilih informan tersebut karena kapasitasnya sebagai pengusaha Kabupaten Wakatobi. Informan tersebut dianggap bisa memberikan gagasan dan input yang dibutuhkan oleh peneliti kaitan dengan data-data penelitian.

13. Zulfitriah

Peneliti memilih informan tersebut karena kapasitasnya sebagai pengusaha Kabupaten Wakatobi. Informan tersebut dianggap bisa memberikan gagasan dan input yang dibutuhkan oleh peneliti kaitan dengan data-data penelitian.

14. Kaswiadi

Peneliti memilih informan tersebut karena kapasitasnya sebagai pengusaha Kabupaten Wakatobi. Informan tersebut dianggap bisa memberikan gagasan dan input yang dibutuhkan oleh peneliti kaitan dengan data-data penelitian.

15. Dani Fardiman

Peneliti memilih informan tersebut karena kapasitasnya sebagai pengusaha muda yang energik di Kabupaten Wakatobi. Informan tersebut dianggap bisa memberikan gagasan dan input yang dibutuhkan oleh peneliti kaitan dengan data-data penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan di lapangan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara Mendalam

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan

yang diwawancarai memberikan jawaban (Moleong, 2005:186). Wawancara mendalam yang telah dilakukan oleh penulis yaitu melakukan percakapan langsung dengan elite politik (bupati) dan pengusaha yang terlibat dalam proses Pemilukada. Sebelum wawancara dengan informan peneliti menyediakan alat tulis dan alat perekam, jika memungkinkan untuk mencatat pernyataan informan maka peneliti akan mencatat tetapi jika tidak memungkinkan maka peneliti merekam wawancara dengan informan.

Wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang sebelumnya telah disusun oleh penulis sebagai acuan dan sifatnya tidak mengikat sehingga banyak pertanyaan baru yang muncul pada saat wawancara terkait dengan hubungan antara bupati dengan pengusaha di daerah pra dan pasca pemilihan umum bupati/wakil bupati di Kabupaten Wakatobi Tahun 2015. Secara umum pertanyaan peneliti yaitu bagaimana hubungan bupati dengan pengusaha pra dan pasca Pemilukada Kabupaten Wakatobi Tahun 2015.

2. Studi Kepustakaan

Pada studi pustaka, penulis melakukan pengumpulan data yang berhubungan dengan penelitian yaitu membaca sumber-sumber literatur berkaitan dengan hubungan antara penguasa dengan pengusaha khususnya yang terjadi pada Pemilukada di Kabupaten Wakatobi.

Teknik ini digunakan untuk menunjang data primer atau data utama yang diperoleh dari informan. Teknik ini juga sangat membantu penulis dalam menelusuri pembahasan melalui tulisan-tulisan yang pernah ada sehingga dengan mudah penulis mengelaborasi antara informasi yang dipaparkan oleh informan dengan informasi tertulis yang ada sebelumnya.

F. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data penelitian ini digunakan analisis data model interaktif Milles dan Huberman (2007) yaitu terdapat tiga proses yang berlangsung secara interaktif.

1. Reduksi data, yaitu proses memilih memfokuskan, menyederhanakan, dan mengabstraksikan data dari berbagai sumber data misalnya dari catatan lapangan, dokumen, arsip dan sebagainya, sedangkan proses mempertegas, memperpendek membuang yang tidak perlu menentukan fokus dan mengatur data sehingga kesimpulan bisa dibuat.
2. Penyajian data, seperti merakit data dan menyajikan dengan baik supaya lebih mudah dipahami. Penyajian bisa berupa matriks, gambar, skema, jaringan kerja, tabel dan narasi.
3. Menarik kesimpulan/verifikasi, proses penarikan kesimpulan awal harus kuat dan terbuka, kesimpulan akhir dilakukakn setelah pengumpulan data berakhir (Sugiyono, 2010:246).

Bab 4

Hasil dan Pembahasan

A. Gambaran Umum Kabupaten Wakatobi

1. Aspek Geografi dan Demografi

Luas wilayah Kabupaten Wakatobi adalah sekitar 19.200 Km², terdiri dari daratan seluas ± 823 Km² atau hanya sebesar 3,00 persen dan luas perairan (laut) ± 18.377 Km² atau sebesar 97,00 persen dari luas Kabupaten Wakatobi. Atas dasar kondisi tersebut, maka potensi sektor perikanan dan kelautan serta sektor pariwisata berbasis wisata laut/bahari menjadi sektor andalan daerah Kabupaten Wakatobi.

Kabupaten Wakatobi terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan, yaitu Kecamatan Wangi-Wangi, Wangi-Wangi Selatan, Kaledupa, Kaledupa Selatan, Tomia, Tomia Timur, Binongko dan Kecamatan Togo Binongko. Wilayah kecamatan terluas adalah kecamatan Wangi-Wangi dengan luas 241 Km² atau 29,40 persen yang sekaligus merupakan wilayah ibu kota kabupaten. Sedangkan kecamatan yang wilayahnya paling kecil adalah Kecamatan Kaledupa, yaitu seluas 45,50 Km² atau 5,53 persen dari total luas wilayah daratan Kabupaten Wakatobi. Luas Wilayah Kabupaten Wakatobi menurut kecamatan disajikan pada tabel 4.

Tabel 4. Luas Wilayah Kabupaten Wakatobi Menurut Kecamatan

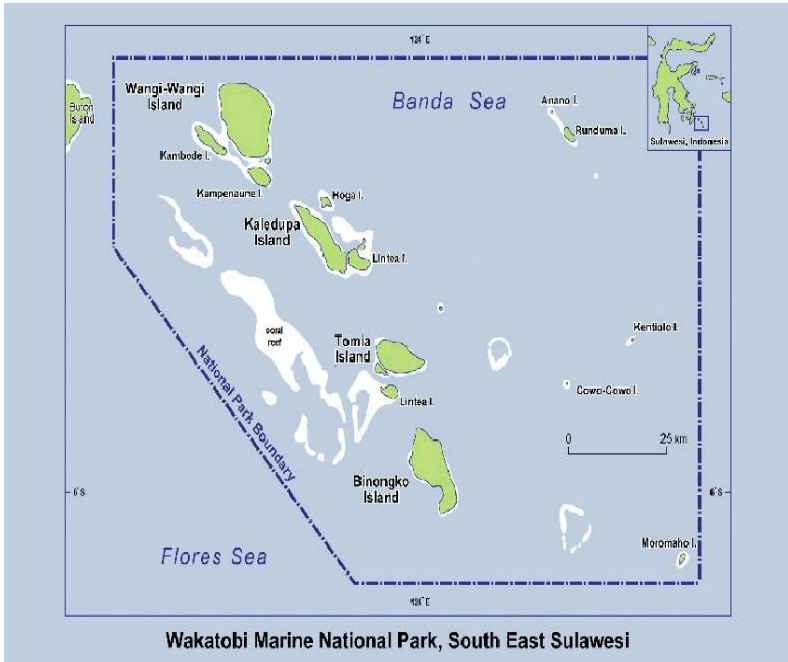
No.	Kecamatan	Luas Daratan (Km ²)	Persentase (%)
1	Wangi-Wangi	241,98	29,40
2	Wangi-Wangi Selatan	206,02	25,03
3	Kaledupa	45,50	5,53
4	Kaledupa Selatan	58,50	7,11
5	Tomia	47,10	5,72
6	Tomia Timur	67,90	8,25
7	Binongko	93,10	11,31
8	Togo Binongko	62,90	7,64
Luas Total Darat		823,00	3,00
Luas Laut		18.377,00	97,00
Total		19.200,00	100,00

Sumber: Kabupaten Wakatobi Dalam Angka, 2016

Wilayah Kabupaten Wakatobi diapit oleh perairan laut, yaitu Buton, Laut Banda dan Laut Flores. Dengan demikian, maka batas-batas administratif daerah Kabupaten Wakatobi berada pada wilayah perairan laut, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah perairan laut Kabupaten Buton dan Buton Utara.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Banda.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores.
- Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah perairan laut Kabupaten Buton.

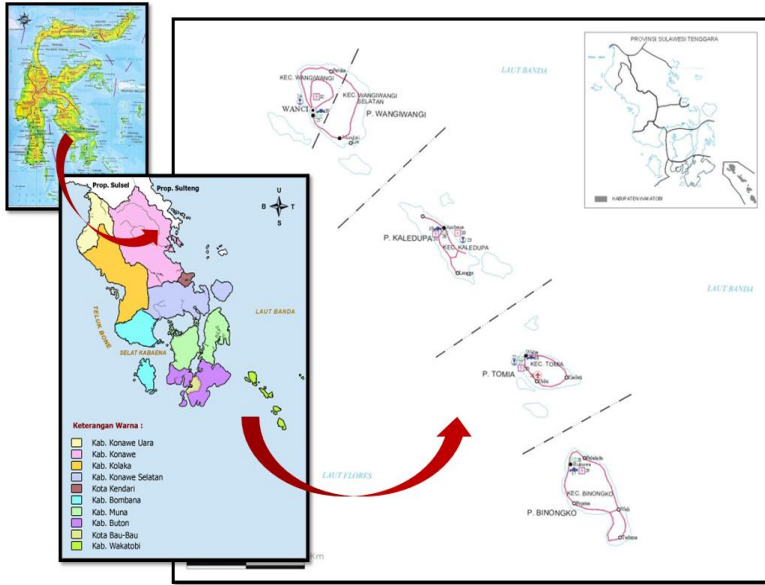
Batas wilayah administrasi Kabupaten Wakatobi dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2. Peta Batas Wilayah Kabupaten Wakatobi.

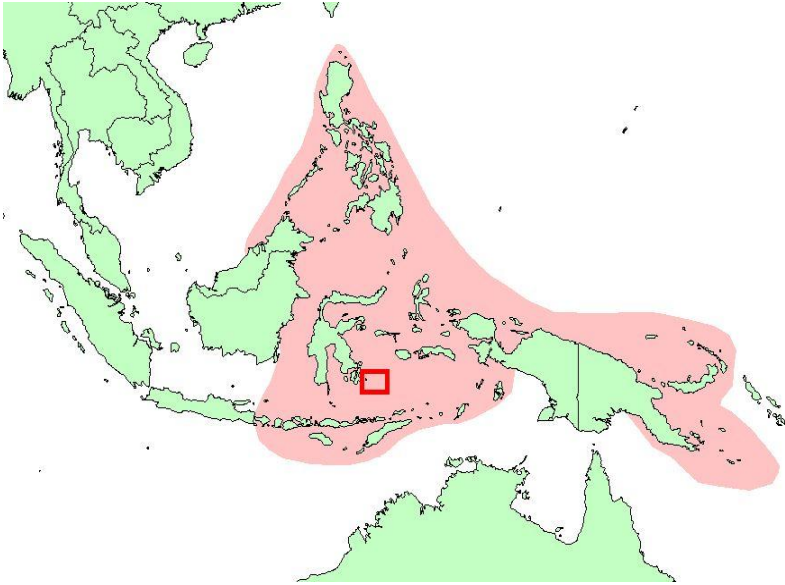
2. Letak dan Kondisi Geografis

Letak geografis Kabupaten Wakatobi berada dalam gugusan pulau-pulau di jazirah Tenggara Kepulauan Sulawesi Tenggara, tepatnya di sebelah Tenggara Pulau Buton. Secara astronomis terletak pada bagian selatan garis khatulistiwa, membentang dari Utara ke Selatan pada posisi garis lintang $5^{\circ}12' - 6^{\circ}25'$ Lintang Selatan (sepanjang kurang lebih 160 km) dan garis bujur $123^{\circ}20' - 124^{\circ}39'$ Bujur Timur (sepanjang kurang lebih 120 km), sebagaimana disajikan pada gambar di bawah ini.



Gambar. Letak Geografis Kabupaten Wakatobi.

Posisi Geostrategis Kabupaten Wakatobi terletak pada posisi sangat strategis karena: (1) Perairan laut Kabupaten Wakatobi dilalui oleh jalur pelayaran kawasan Timur dan Barat Indonesia; (2) Ditinjau dari sisi *bioregion*, letak geografis Kabupaten Wakatobi sangat penting karena berada pada kawasan yang sangat potensial yakni diapit oleh Laut Banda dan Laut Flores yang memiliki potensi sumberdaya keragaman hayati kelautan dan perikanan yang cukup besar; dan (3) Kabupaten Wakatobi berada pada Pusat Kawasan Segi Tiga Karang Dunia (*Coral Tri-angle Center*) yang meliputi 6 (enam) negara, yakni Indonesia, Malaysia, Philippines, Papua New Guine, Solomon Island, dan Timor Leste. Posisi Kabupaten Wakatobi pada Pusat Segi Tiga Karang Dunia, disajikan pada gambar berikut ini.



Gambar 4. Posisi Wakatobi Dalam Pusat Segi Tiga Karang Dunia

Kabupaten Wakatobi merupakan gugusan kepulauan yang berjumlah 39 pulau, terdiri atas 4 (empat) pulau besar, yakni **W**angi-Wangi, **K**aledupa, **T**omia, dan **B**inongko (WAKATOBI). Keempat pulau tersebut mudah terjangkau baik dalam region Provinsi Sulawesi Tenggara, regional Kawasan Timur Indonesia, nasional maupun internasional. Di Pulau Wangi-Wangi terdapat Bandara Udara Matahora, Pelabuhan Laut Nasional Panggulu Belo, dan jalur angkutan ferry ASDP Kamaru-Wanci, dan di Pulau Tomia tersedia Bandara Udara Maranggo moda transportasi khusus untuk wisatawan dari Bali dan Singapura.

Transportasi laut antar pulau Kabupaten Wakatobi cukup lancar. Akses dari ibukota kabupaten (Wangi-Wangi) ke Pulau

Kaledupa dan Binongko tersedia setiap hari dengan armada kapal cepat (*speed boat*). Satu-satunya wilayah pulau kecil yang relatif sulit dijangkau namun telah berpenghuni ialah Pulau Runduma, termasuk ke dalam administratif Kecamatan Tomia, terletak di bagian timur Pulau Tomia tepat di tengah Laut Banda.

Topografi

Topografi wilayah daratan Kabupaten Wakatobi sebagian besar atau sekitar 40 persen adalah landai dengan ketinggian sekitar 3 s.d. 20 m di atas permukaan air laut (dpl). Topografi landai terutama terdapat dibagian selatan Pulau Wangi-Wangi, bagian utara dan selatan Pulau Kaledupa, bagian barat dan timur Pulau Tomia, serta wilayah bagian selatan Pulau Binongko. Sedangkan bentuk topografi perbukitan, berada di tengah-tengah pulau dengan ketinggian berkisar antara 20 s.d. 350 m dpl.

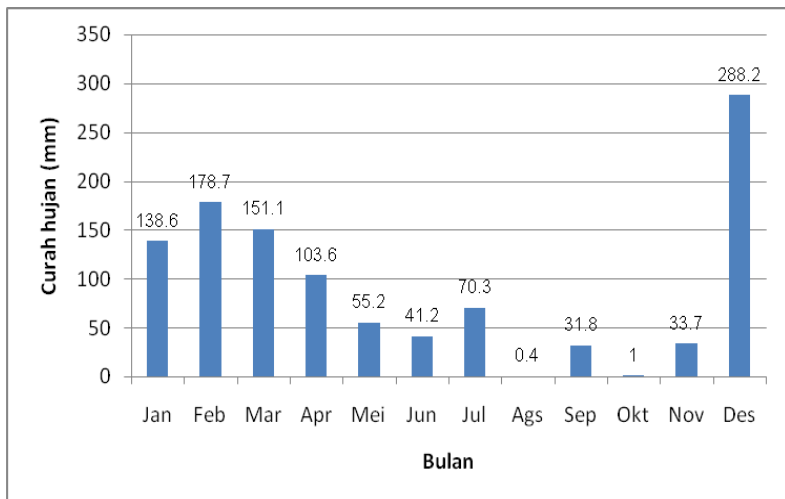
Selain bentangan pulau-pulau kecil, relief dan topografi, di Wakatobi juga membentang Gunung Tindoi di Pulau Wangi-Wangi, Gunung Pangilia di Pulau Kaledupa, Gunung Patua di Pulau Tomia dan Gunung Watu'a di Pulau Binongko. Pada puncak gunung di empat pulau besar tersebut, terdapat situs peninggalan sejarah berupa benteng dan makam yang sangat erat kaitannya dengan penyebaran agama Islam di Wakatobi maupun sejarah perkembangan kejayaan Kesultanan Buton, Tidore, dan Ternate. Situs sejarah dimaksud ialah Benteng Liya, Benteng Tindoi, Benteng Patu'a, dan Benteng Suosuo serta peninggalan benda-benda purbakala lainnya. Kesemuanya merupakan aset daerah yang sangat berharga, terutama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai obyek wisata budaya, baik nasional maupun internasional.

Klimatologi

Menurut klasifikasi Schmidt-Fergusson, iklim di Kepulauan Wakatobi termasuk tipe C, dengan dua musim yaitu musim

kemarau (musim timur: April–Agustus) dan musim hujan (musim barat: September–April). Musim angin barat berlangsung dari bulan Desember sampai dengan Maret yang ditandai dengan sering terjadi hujan. Musim angin timur berlangsung bulan Juni sampai dengan September. Peralihan musim yang biasa disebut musim pancaroba terjadi pada bulan Oktober–November dan bulan April–Mei.

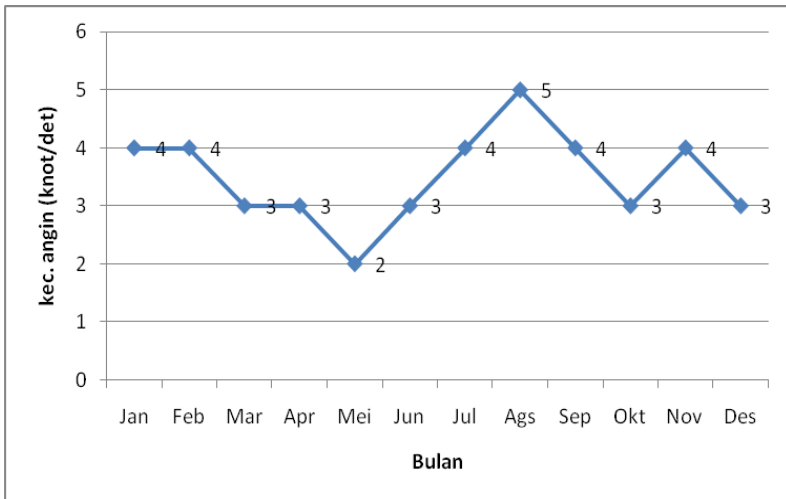
Berdasarkan pencatatan dari Stasiun Meteorologi Kls III Betoambari, curah hujan di Kepulauan Wakatobi 10 tahun terakhir berkisar antara 0,4–288,2 mm (Gambar 5), curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember dengan rata-rata mencapai 19,51 mm (Gambar 6). Jumlah hari hujan mengikuti pola jumlah curah hujan dengan kisaran antara 1–19 hari hujan. Suhu udara maksimum berkisar 31,5–34,4⁰C dan suhu udara minimum berkisar pada 22,3–24,9⁰C, dengan kisaran suhu rata-rata antara 23,7–32,4⁰C. Kelembaban udara antara 71–86%.



Gambar. Rata-Rata Curah Hujan Selama Tahun 2009-2016
(Sumber: Stasiun Metereologi Kls III Betoambari, 2016).

Pola curah hujan dapat menjadi arahan dalam perencanaan pola tanaman lahan kering terutama untuk tanaman pangan (semusim) dan hortikultura (sayur-sayuran). Dalam hal tersebut, musim tanam (MT) I bisa dilaksanakan pada bulan November dan MT II pada bulan Maret. Pada tanaman perkebunan, pola curah hujan tersebut dapat dipakai sebagai arahan penanaman bibit di lapang sehingga tidak diperlukan penyiraman.

Kecepatan angin berkisar antara 2 – 5 4 knot/det dengan rata-rata sebesar 4 knot/det. Angin kencang bertiup pada bulan Juli sampai September, kemudian bulan November, Januari dan Februari. Tiupan angin yang kencang dapat menimbulkan gelombang yang berpengaruh pada frekuensi melaut para nelayan dan selanjutnya terhadap jumlah ikan hasil tangkapan. Terkait hal ini, program pengadaan kapal ikan dengan ukuran yang memadai akan sangat membantu para nelayan.



Gambar. Rata-Rata Kecepatan Angin Selama Tahun 2009-2016
(Sumber: Stasiun Metereologi Kls III Betoambari, 2016).

3. Taman Nasional Laut Wakatobi

Kawasan Kepulauan Wakatobi dan perairan di sekitarnya seluas $\pm 1.390.000$ Ha ditunjuk sebagai Taman Nasional berdasarkan SK Menhut No. 393/Kpts-VI/1996, tanggal 30 Juli 1996 dan telah ditetapkan berdasarkan SK Menhut No. 7651/Kpts-II/2002, tanggal 19 Agustus 2002, terdiri dari 4 (empat) pulau besar (Pulau Wangi-Wangi, Pulau Kaledupa, Pulau Tomia dan Pulau) yang terbagi menjadi 5 (lima) kecamatan dalam wilayah administratif Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara.

Taman Nasional Wakatobi (TNW) dikelola dengan sistem zonasi, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam No. 198/Kpts/DJVI/1997 tanggal 31 Desember 1997, terdiri atas: zona inti, zona pelindung, zona rehabilitasi, zona pemanfaatan, dan zona pemanfaatan tradisional. Rumusan zonasi TNW diuraikan sebagai berikut:

- a. Zona Inti (*Core Zone*), bagian taman nasional yang mempunyai kondisi alam baik biota atau fisiknya masih asli dan tidak atau belum diganggu oleh manusia yang mutlak dilindungi, berfungsi untuk perlindungan keterwakilan keanekaragaman hayati yang asli dan khas. Zona inti yang hanya terdapat di sebagian Pulau Moromaho memiliki potensi dan keterwakilan sumberdaya penting yaitu ekosistem mangrove, habitat burung, dan pantai peneluran penyu yang mutlak dilindungi dan tertutup dari berbagai macam aktivitas manusia untuk menjaga keutuhan dan kelestarian ekosistem asli dan fungsi ekologisnya. Zona inti TNW meliputi wilayah perairan dan sebagian daratan Pulau Moromaho seluas ± 1.300 Ha (0,09%).
- b. Zona Perlindungan Bahari (*No Take Zone*), adalah bagian taman nasional yang karena letak, kondisi dan potensinya mampu mendukung kepentingan pelestarian pada zona inti dan

zona pemanfaatan. Zona perlindungan bahari di TNW memiliki potensi dan keterwakilan sumberdaya penting yaitu ekosistem mangrove, daerah pemijahan ikan (SPAGS), pantai peneluran penyu, keterwakilan ekosistem karang penghalang (*barrier reef*), keterwakilan ekosistem karang cincin (*atoll*) yang harus dilindungi untuk menjaga keutuhan dan kelestarian keterwakilan ekosistem asli dan fungsi ekologisnya serta mendukung zona inti. Zona perlindungan bahari TNW meliputi sebagian wilayah karang penghalang bagian timur Pulau Wangi-Wangi, karang Pasiroka, bagian Utara dan Timur Pulau Kaledupa, perairan bagian Selatan Pulau Lentea Utara, perairan bagian Utara Pulau Darawa, bagian Selatan Karang Tomia/Kaledupa, pantai dan perairan Pulau Anano, perairan bagian Tenggara Pulau Runduma, karang Runduma, perairan Pulau Kenteole, perairan Pulau Cowo-Cowo/Tuwu-Tuwu, karang Koko dan perairan Pulau Moromaho (di luar zona inti) seluas \pm 36.450 Ha (2,62%).

- c. Zona Pariwisata (*Tourism Zone*), adalah bagian taman nasional yang letak, kondisi dan potensi alamnya yang terutama dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata alam dan kondisi/jasa lingkungan lainnya. Zona pariwisata di TNW memiliki potensi dan keterwakilan sumberdaya penting yang merupakan daya tarik wisata alam dan pemanfaatan jasa lingkungan lainnya berupa ekosistem mangrove, daerah pemijahan ikan (SPAGS), pantai pasir putih Pulau Hoga, keterwakilan ekosistem karang penghalang (*barrier reef*), keterwakilan ekosistem karang cincin (*atoll*) dan keterwakilan ekosistem karang tepi (*fringing reef*) yang harus dilindungi untuk menjaga keutuhan dan kelestarian keterwakilan ekosistem asli dan fungsi ekologisnya serta mendukung zona inti. Zona pariwisata TNW meliputi wilayah

perairan bagian Timur Pulau Wangi-Wangi (*barrier reef*), perairan dan pantai bagian Barat Pulau Hoga, perairan Tanjung Sombano, mangrove di pesisir Sombano-Mantigola Pulau Kaledupa, mangrove di pesisir Pulau Darawa, perairan bagian Barat Waha Pulau Tomia, perairan sekitar Pulau Tolandono Tomia (Onemobaa), dan sebagian wilayah bagian Tengah ke arah Selatan karang Koromaho, karang bagian Barat, Utara dan Selatan karang Tomia, bagian Tenggara karang Kapota, perairan bagian Utara dan Selatan Pulau Binongko serta Karang Otiolo yang merupakan lokasi di wilayah perairan Kep. Wakatobi yang selama ini telah menjadi daerah tujuan wisata serta menjadi sasaran pengembangan pariwisata Kabupaten Wakatobi seluas 6.180 Ha (0,44%).

- d. Zona Pemanfaatan Lokal (*Local Using Zone*) adalah zona yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan terbatas secara tradisional untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat sekitarnya yang biasanya menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam laut. Zona pemanfaatan lokal memiliki kekayaan sumberdaya alam laut berupa ikan karang, ikan pelagis dan biota laut ekonomis lainnya yang dapat dikembangkan untuk usaha perikanan karang dan perikanan tangkap laut dalam bagi masyarakat Wakatobi berdasarkan ketentuan yang berlaku. Zona pemanfaatan lokal TNW meliputi sebagian besar wilayah perairan pesisir pulau-pulau di Kep. Wakatobi selain peruntukan zona lainnya dalam radius ± 4 mil dari Pulau Wangi-Wangi, Pulau Kaledupa, Pulau Tomia, Pulau Binongko, Pulau Runduma, Pulau Kapota, Pulau Komponaone, Pulau Nuabalaa, Pulau Nuaponda, Pulau Matahora, Pulau Sumanga, Pulau Oroho, Pulau Ndaa dan serta sebagian besar wilayah karang

Kapota, karang Kaledupa/Tomia, dan bagian Tengah ke arah Utara karang Koromaho seluas 804.000 Ha (57,84 %).

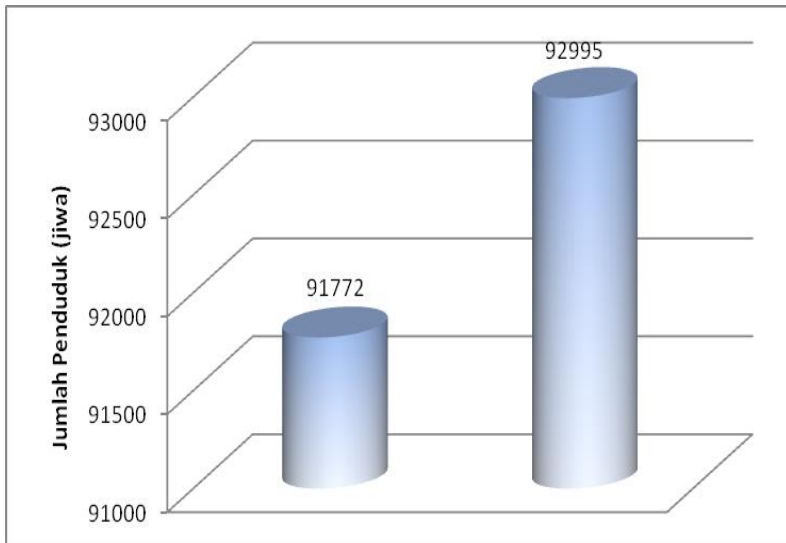
- e. Zona Pemanfaatan Umum (*Common Using Zone*) adalah zona yang diperuntukan bagi pengembangan dan pemanfaatan perikanan laut dalam. Zona pemanfaatan umum memiliki kekayaan sumberdaya alam laut berupa ikan ikan pelagis yang dapat dikembangkan untuk usaha perikanan tangkap laut dalam bagi masyarakat Wakatobi maupun bagi nelayan atau pengusaha perikanan dari luar Wakatobi berdasarkan ketentuan yang berlaku. Zona pemanfaatan umum TNW meliputi sebagian besar wilayah perairan di luar radius \pm 4 mil dari pulau-pulau dan gugusan terumbu karang di Wakatobi seluas 495.700 Ha (35,66%).
- f. Zona Daratan/Khusus (*Land Zone*) adalah wilayah daratan berupa pulau-pulau yang berpenduduk dan telah terdapat hak kepemilikan atas tanah oleh masyarakat atau kelompok masyarakat yang tinggal sebelum wilayah tersebut ditetapkan sebagai taman nasional dimana pengaturannya akan dilakukan lebih lanjut melalui rencana tata ruang wilayah kabupaten. Cakupan zona daratan/khusus meliputi Pulau Wangi-Wangi dan pulau-pulau kecil di sekitarnya, Pulau Kaledupa, Pulau Tomia, Pulau Binongko, Pulau Runduma, Pulau Anano, Pulau Kapota, Pulau Komponaone, Pulau Hoga, Pulau Lentea, Pulau Darawa, Pulau Lentea Selatan, Pulau Sawa, Pulau Kenteole, Pulau Tuwu-Tuwu, dan sebagian Pulau Moromaho seluas \pm 46.370 Ha (3,34%).

4. Demografi

Jumlah Penduduk

Pada tahun 20016, jumlah penduduk di Kabupaten Wakatobi tercatat sebanyak 91.772 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk di

Kabupaten Wakatobi periode tahun 2009-2016 rata-rata sekitar 0,33 persen per tahun.



Gambar Jumlah Penduduk Kabupaten Wakatobi Tahun 2009 dan 2016.

Kepadatan penduduk pada tahun 2016 sekitar 111 jiwa/Km² meningkat menjadi 113 jiwa/Km² dari tahun 2010. Kepadatan penduduk tertinggi pada tahun 2016 terdapat di Kecamatan Kale-dupa. Sedangkan kepadatan penduduk yang terendah pada tahun 2016 adalah di Kecamatan Wangi-Wangi yakni 89 jiwa/Km². Migrasi penduduk ke ibukota kabupaten (Wangi-Wangi) ialah fenomena yang sudah terasa seiring dengan dinamika pembangunan dan tuntutan pekerjaan. Hal ini dapat ditekan antara lain dengan terbukanya lapangan pekerjaan yang akan dikembangkan pada setiap kecamatan sesuai potensinya.

Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 44.253 jiwa dan perempuan sebanyak 47.520 jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 93.

Artinya, jumlah penduduk perempuan 7 persen lebih banyak dibanding laki-laki. Pada tahun 2016, jumlah penduduk laki-laki meningkat menjadi 44.640 jiwa dan perempuan sebanyak 48.355 jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 92 atau penduduk perempuan 8 persen lebih banyak dibanding laki-laki. Kondisi ini akan berimplikasi pada jenis pekerjaan dan kesempatan kerja perempuan.

Komposisi Penduduk Menurut Struktur Usia

Pada tahun 2016, penduduk berusia muda atau yang berumur 15 tahun ke bawah di Kabupaten Wakatobi mencapai 29.647 jiwa atau sekitar 32,30 persen dari total jumlah penduduk. Persentase jumlah penduduk berusia 15 tahun kebawah cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 misalnya, jumlah penduduk berusia 15 tahun ke bawah sebanyak 31.893 jiwa atau sebesar 34,30 persen. Kondisi tersebut, berimplikasi terhadap besarnya angka beban tanggungan pada tahun 2016 yang mencapai 69,34 persen yang merupakan perbandingan angka antara banyaknya penduduk yang tidak produktif (umur dibawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan banyaknya penduduk yang produktif yakni penduduk yang berusia antara 15-64 tahun. Angka tersebut menunjukkan bahwa setiap 100 orang produktif menanggung 69 orang tidak produktif.

Komposisi Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan

Pada tahun 2016, jumlah penduduk di Kabupaten Wakatobi yang tergolong usia kerja (umur 15 tahun ke atas) sebanyak 62.123 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 28.900 jiwa atau 46,52 persen dan perempuan sebanyak 33.223 jiwa atau 53,48 persen. Dari jumlah tersebut, terdapat angkatan kerja sebanyak 44.435 orang terdiri dari yang bekerja 40.525 jiwa atau 65,23 persen terhadap penduduk usia kerja dan pengangguran terbuka (rasio pencari kerja terhadap angkatan kerja) sebanyak 8,80 persen. Sedangkan penduduk yang bukan angkatan kerja sebanyak 17.688 jiwa atau

28,47 persen dari usia kerja yang terdiri dari sekolah 17.420 orang atau 9,08 persen, mengurus rumah tangga 10.433 orang atau sebesar 16,78 persen dan kegiatan lainnya sebesar 1.613 jiwa atau 2,60 persen.

Komposisi penduduk menurut lapangan pekerjaan pada tahun 2016 di Kabupaten Wakatobi mayoritas bekerja pada sektor pertanian, yakni sebanyak 24.864 jiwa atau 55,96 persen, kemudian sektor perdagangan 6.261 jiwa atau 14,09 persen disusul sektor jasa, transportasi dan industri.

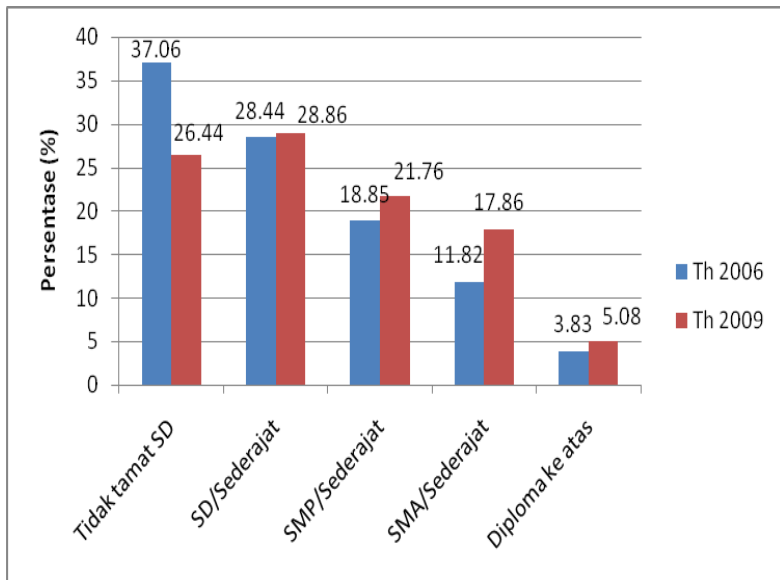
Angka-angka tersebut di atas, mengalami perubahan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2016 misalnya, jumlah penduduk usia kerja mencapai 60.791 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 28.375 jiwa atau 46,54 persen dan perempuan sebanyak 32.596 jiwa atau 53,46 persen. Dari jumlah tersebut, penduduk angkatan kerja sebanyak 41.696 jiwa. Angkatan kerja tersebut, terdiri dari 39.538 jiwa bekerja atau sekitar 64,84 persen (rasio penduduk bekerja terhadap penduduk usia kerja) serta 5,18 persen menganggur. Dalam 5 tahun terakhir, tingkat pengangguran di Kabupaten Wakatobi menurun dari 8,80 persen menjadi 5,18 persen.

Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan

Dilihat dari sisi jumlah penduduk 10 tahun ke atas dan kaitannya dengan tingkat pendidikan menunjukkan adanya peningkatan. Berdasarkan hasil Susenas 2016, tingkat pendidikan penduduk Wakatobi berturut-turut yaitu penduduk tidak atau belum tamat SD sebanyak 27.395 jiwa atau 37,06 persen; tamat SD sebanyak 21.023 jiwa atau 28,44 persen; tamat SMP sederajat 13.934 jiwa atau 18,85 persen, tamat SMA sederajat 8.738 jiwa atau 11,82 persen, dan jenjang Diploma ke atas, sebanyak 2.831 jiwa atau 3,83 persen.

Pada tahun 2016, tingkat pendidikan penduduk Wakatobi berturut-turut yaitu penduduk tidak atau belum tamat SD sebanyak 19.033 jiwa atau 26,44 persen; tamat SD sebanyak 21.896 jiwa atau 28,86 persen; tamat SMP sederajat 17.053 jiwa atau 21,76 persen, tamat SMA sederajat 11.335 jiwa atau 17,86 persen. Sedangkan pendidikan Diploma ke atas sebanyak 2.971 jiwa atau 5,08 persen.

Persentase komposisi penduduk menurut jenjang pendidikan disajikan pada gambar di bawah. Penduduk yang tamat SMA/ Sederajat naik dari 11,82 persen menjadi 17,86 persen dan yang berpendidikan tinggi naik dari 15,64 persen tahun 2006 menjadi 22,94 persen pada tahun 2016.



Gambar Komposisi Penduduk Kabupaten Wakatobi Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun 2016 dan 2010.

Pemerintahan

Tabel 5. Statistik Pemerintahan

Uraian	2014	2015	2016
Administrasi wilayah			
Kecamatan	8	8	8
Desa	75	75	75
Kelurahan	25	25	25
Dusun	198	198	198
Lingkungan	81	81	81
PNS menurut jenis kelamin			
Laki-laki	1.627	1.771	1.639
Perempuan	1.622	1.787	1.501
Total	3.249	3.558	3.140

Sumber: Wakatobi dalam Angka 2017

Peningkatan kinerja aparatur daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan daerah yang memiliki kapasitas yang memadai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah merupakan tantangan dan permasalahan utama kurun waktu lima tahun kedepan. Permasalahan lainnya adalah terbentuknya kelembagaan pemerintah daerah yang efisien dan efektif, meningkatnya efisiensi dan efektivitas penggunaan dana perimbangan daerah, aparatur pemerintah daerah dan anggota DPRD yang profesional, terlaksananya standar pelayanan minimal, serta penetapan dan pelaksanaan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, dalam pelaksanaan pembangunan di era otonomi, sangat memungkinkan bagi pemerintah daerah untuk melakukan berbagai inovasi dan kreasi sesuai kondisi dan kebutuhan daerah. Walaupun demikian, berdasarkan realitas yang ada, pengelolaan pemerintahan daerah di Kabupaten Wakatobi belum berjalan secara optimal. Hal ini antara lain terlihat dalam sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan

daerah di Kabupaten Wakatobi yang belum berjalan sebagaimana mestinya. Implikasi yang ditimbulkan antara lain adalah masih adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kondisi tersebut terutama disebabkan oleh kapasitas sumberdaya aparatur daerah yang masih terbatas dan tidak sesuai dengan kompetensinya.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, pemerintah daerah secara bertahap memperbaiki kondisi sumberdaya manusia melalui berbagai Diklat, workshop, dan lain-lain. Tantangan dan permasalahan lainnya yang cukup strategis berkaitan dengan pembinaan disiplin aparatur daerah yang belum optimal. Disamping itu, penataan administrasi asset daerah juga masih memerlukan penanganan yang lebih professional.

Gambaran Umum Keuangan

Penghitungan kerangka pendanaan dan rencana penggunaannya disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 6. Kapasitas Riil Kemampuan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Wakatobi

No	Uraian	Proyeksi				
		2012	2013	2014	2015	2016
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan	419.447.480. 838	441.843.145. 832	466.708.681. 018	494.101.347. 053	524.100.098. 008
2	Pencairan dana cadangan (Sesuai Perda)	-	-	-	-	-
3	Sisa lebih (riil) Perhitungan Anggaran	(4.081.590. 293)	(4.285.669. 807)	(4.499.953. 297)	(4.724.950. 962)	(4.961.198. 510)

Total Penerimaan		415.365.890.	437.557.476.	462.208.727.	489.376.396.	519.138.899.
		545	025	721	091	498
	Dikurangi					
4	Belanja dan Pengeluaran					
	Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	187.338.125 835	239.665.120. 224	273.311.554. 791	311.849.675. 878	355.997.745. 801
	Kapasitas riil kemampuan daerah	228.027.764. 710	197.892.355. 801	188.897.172. 930	177.526.720. 213	163.141. 153.697

Sumber: Dinas PPKAD Kabupaten Wakatobi, 2016

Kebijakan Anggaran Belanja daerah Kabupaten Wakatobi untuk 5 (lima) tahun ke depan diarahkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran sebagai berikut:

- (1) Pengeluaran yang sifatnya wajib dan mengikat serta tidak dapat ditunda pembayarannya setiap tahun seperti gaji dan tunjangan PNS dan anggota DPRD, belanja jasa listrik, air, telepon, dan belanja sewa yang telah ada ikatan kontraknya. Pengeluaran wajib juga adalah untuk membayar honor/tambahan penghasilan/tunjangan kinerja PNS dan Tenaga Penunjang Program/Kegiatan, tambahan penghasilan khusus guru yang belum sertifikasi, uang lembur dan makanan dan minuman pegawai, tunjangan profesi guru, dan pembiayaan pengeluaran untuk dana cadangan, penyertaan modal pada BUMD, penyertaan modal non permanen untuk dana bergulir kepada kelompok masyarakat, serta bantuan keuangan (ADD) desa.
- (2) Pengeluaran prioritas I merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (*dedicated*) Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan

oleh daerah pada tahun rencana. Program prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah dan terkait langsung dengan janji-janji politik/kampanye Bupati/Wakil Bupati Wakatobi tahun 2011-2016. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengerluaran Prioritas II merupakan program prioritas di tingkat SKPD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Suatu prioritas II berhubungan dengan program/kegiatan unggulan SKPD yang paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu.
- (4) Pengeluaran Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial, organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga. Pengalokasian dana pada prioritas III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar.

Rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan daerah Kabupaten Wakatobi tahun 2012-2016, disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 7. Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan
Keuangan Daerah Kabupaten Wakatobi**

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
I	Kapasitas riil kemampuan daerah	228.027.764 .710	197.892.355 .801	188.897.172 .930	177.526.720 .213	163.141.153. 697
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas I	526.154.000 .000	450.960.000 .000	440.232.000 .000	451.168.800 .000	445.484.580. 000
II.a	Belanja Langsung	352.354.000 .000	259.780.000 .000	229.934.000 .000	219.841.000 .000	191.024.000. 000
II.b	Pembentukan dana cadangan	2.500.000. 000	2.500.000. 000	2.500.000. 000	2.500.000. 000	2.500.000.000
	Dikurangi					
II.c	Belanja Langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	26.000.000. 000	26.650.000. 000	27.316.250. 000	27.999.156. 250	28.699.135. 156
II.d	Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	5.000.000. 000	5.000.000. 000	5.000.000. 000	5.000.000. 000	5.000.000.000
II	Total Rencana Pengeluaran Prioritas I (IIa+IIb-IIc-IId)	323.854.000 .000	253.130.000 .000	200.117.750 .000	189.341.843 .750	159.824.864. 844

	Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I (I - II)	(95.826.235.290)	(55.237.644.199)	(11.220.577.070)	(11.815.123.537)	3.316.288.853
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas II	76.708.000.000	81.310.000.000	86.188.000.000	90.164.000.000	96.834.000.000
III.a	Belanja Tidak Langsung	203.800.000.000	221.180.000.000	240.298.000.000	261.327.800.000	284.460.580.000
	Dikurangi					
III.b	Belanja Tidak Langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	173.800.000.000	191.180.000.000	210.298.000.000	231.327.800.000	254.460.580.000
III	Total Rencana Pengeluaran Prioritas II (IIIa-IIIb)	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000
	Surplus anggaran riil atau Berimbang (I-II-III)	(155.826.235.290)	(85.237.644.199)	(41.220.577.070)	(41.815.123.537)	(26.683.711.147)

Tabel di atas menunjukkan bahwa rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah mengalami defisit selama periode RPJMD tahun 2012-2016. Pada tahun pertama mengalami defisit sebesar Rp. 155.826.235.290. Selanjutnya untuk tahun

kedua mengalami defisit sebesar Rp. 85.237.644.199, tahun ketiga Rp. 41.220.577.070, tahun keempat sebesar Rp. 41.815.123.537 dan tahun kelima sebesar Rp. 26.683.711.147.

Sumber pendanaan dalam rangka menanggulangi defisit sebagaimana tersebut di atas, direncanakan diperoleh melalui pendanaan dari APBN, APBD Provinsi Sulawesi Tenggara dan sumber-sumber pendanaan lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Perdagangan

Statistik perdagangan, jumlah perusahaan perdagangan menurut badan hukum di Kabupaten Wakatobi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Tipe Badan Hukum di Kab. Wakatobi

Tipe Badan Hukum	2014	2015	2016
Perseroan Terbatas	14	18	4
Cv/Firma	65	54	37
Koperasi	14	5	5
Perorangan	17	12	59
Lainnya	0	61	10

Sumber: Wakatobi Dalam Angka Tahun 2017

Sebelum sampai ke tangan konsumen akhir, semua produk hasil produksi melewati alur perdagangan. Ada banyak jenis perdagangan mulai dari pedagangan besar, kecil hingga eceran. Menurut badan hukumnya, perdagangan dibedakan menjadi Lima (5) tipe yaitu Perseroan Terbatas, CV/Firma, Koperasi, perorangan, dan yang tidak termasuk dalam keempat golongan tersebut masuk ke dalam golongan tipe lainnya. Selama 3 (tiga) tahun terakhir jumlah perseroan terbatas (PT) yang ada di Kabupaten Wakatobi berfluktuatif. Pada tahun 2014 jumlah perseroan terbatas yang ada di Wakatobi sebanyak 14 PT, meningkat menjadi 18 PT, hingga

kemudian mengalami penurunan tajam pada tahun 2016 menjadi empat (4) PT. Berbeda dengan jumlah PT yang 1 (satu) tahun terakhir mengalami penurunan jumlah, jumlah perdagangan perorangan mengalami peningkatan yang semula 12 usaha menjadi 59 usaha, jumlah koperasi cenderung konstan satu tahun terakhir yaitu sebanyak unit Lima (5) usaha

5. Gambaran Umum Pelaksanaan Pemilihan Kepala daerah Langsung

Berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten Wakatobi nomor 01/kpts/kpu 026.433588/2015 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati Wakatobi tahun 2015 sebagai berikut:

Tabel 9. Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi tahun 2015

No	Kegiatan	Jadwal	
		Awal	Akhir
I	Persiapan		
1	Perencanaan Program dan Anggaran	18 – 02 – 2015	30 – 04 – 2015
2	Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan	23 – 02 – 2015	30 – 04 – 2015
3	Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis	16 – 04 – 2015	8 – 12 – 2015
4	Pembentukan PPK, PPS dan KPPS		
	a. Pembentukan PPK	19 April 2015	18 Mei 2015
	1. Pengumuman pendaftaran	19 April 2015	24 April 2015

	2. Penerimaan pendaftaran	20 April 2015	29 April 2015
	3. Penelitian administrasi	30 April 2015	03 Mei 2015
	4. Pengumuman hasil penelitian administrasi	04 Mei 2015	04 Mei 2015
	5. Seleksi tertulis calon anggota PPK	05 Mei 2015	07 Mei 2015
	6. Pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPK	08 Mei 2015	09 Mei 2015
	7. Wawancara calon anggota PPK	10 Mei 2015	13 Mei 2015
	8. Pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK	14 Mei 2015	17 Mei 2015
	9. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji	18 Mei 2015	18 Mei 2015
	b. Pembentukan PPS	19 April 2015	18 Mei 2015
	1. Mengirim surat ke Kepala Desa / Lurah/Badan Permusyawaratan Desa	19 April 2015	24 April 2015
	2. Menerima surat dari Kepala Desa /Lurah/Badan Permusyawaratan Desa	20 April 2015	04 Mei 2015
	3. Pengajuan Calon Baru jika tidak memenuhi syarat	05 Mei 2015	10 Mei 2015
	4. Pengumuman Calon Anggota PPS	11 Mei 2015	17 Mei 2015
	5. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji	18 Mei 2015	18 Mei 2015
	c. Pembentukan KPPS	9 September 2015	8 November 2015

5	Pemantauan Pemilihan		
	Pendaftaran Pemantau Pemilihan	1 Mei 2015	2 November 2015
6	Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4)		
	a. Penerimaan DP4	3 Juni 2015	3 Juni 2015
	b. Analisis DP4	4 Juni 2015	10 Juni 2015
	c. Sinkronisasi DP4 dengan Daftar Pemilih Pemilu Terakhir	11 Juni 2015	19 Juni 2015
	d. Penyampaian Hasil Analisis DP4 dan Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Kabupaten Wakatobi		23 Juni 2015
	e. Pengumuman Hasil Analisis DP4	24 Juni 2015	24 Juni 2015
7	Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih		
	a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten Wakatobi dan penyampaian kepada PPS	24 Juni 2015	14 Juli 2015
	b. Pemutakhiran:	15 Juli 2015	26 Agustus 2015
	1. Pencocokan dan penelitian	15 Juli 2015	19 Agustus 2015
	2. Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran.	20 Agustus 2015	26 Agustus 2015
	3. Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/ kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	27 Agustus 2015	29 Agustus 2015
	4. Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran	30 Agustus 2015	31 Agustus 2015

	tingkat kecamatan		
5.	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pe mutakhiran tingkat kabupaten untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)	1 September 2015	2 September 2015
6.	Penyampaian DPS kepada PPS	3 September 2015	9 September 2015
7.	Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	10 September 2015	19 September 2015
8.	Perbaikan DPS	20 September 2015	25 September 2015
9.	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan penyampiannya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK	26 September 2015	28 September 2015
10.	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan	29 September 2015	30 September 2015
11.	Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten untuk ditetapkan sebagai DPT	1 Oktober 2015	2 Oktober 2015
	b) Penyampaian DPT kepada PPS	3 Oktober 2015	12 Oktober 2015
	c) Pengumuman DPT oleh PPS	12 Oktober 2015	9 Desember 2015
12.	Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1):		
	a) Pendaftaran pemilih yang belum terdaftar dalam DPT serta penyusunan DPTb-1	13 Oktober 2015	20 Oktober 2015
	b) Rekapitulasi DPTb-1 tingkat	21 Oktober	23 Oktober

	desa/kelurahan dan Penyampaiannya beserta DPTb-1 oleh PPS kepada PPK	2015	2015
	c) Rekapitulasi DPTb-1 tingkat kecamatan	24 Oktober 2015	26 Oktober 2015
	d) Rekapitulasi dan penetapan DPTb-1 tingkat kabupaten	27 Oktober 2015	28 Oktober 2015
	e) Penyampaian DPTb-1 kepada PPS	29 Oktober 2015	7 November 2015
	f) Pengumuman DPTb 1 oleh PPS	7 November 2015	9 Desember 2015
II	Penyelenggaraan		
1	Syarat dukungah Pasangan Calon Perseorangan		
	a. Penerimaan Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) dari Pemerintah Daerah	17 April 2015	17 April 2015
	b. Pengumuman penyerahan syarat dukungan	24 Mei 2015	7 Juni 2015
	c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi		
	1) Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi	11 Juni 2015	15 Juni 2015
	2) Penelitian jumlah minimal dukungan	11 Juni 2015	18 Juni 2015
	3) Analisis dukungan ganda	11 Juni 2015	18 Juni 2015
	d. Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi kepada PPS	19 Juni 2015	22 Juni 2015

	e. Penelitian administrasi dan faktual di tingkat desa/kelurahan	23 Juni 2015	6 Juli 2015
	f. Rekapitulasi di tingkat kecamatan	7 Juli 2015	13 Juli 2015
	g. Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Wakatobi	14 Juli 2015	19 Juli 2015
2	Pendaftaran Pasangan Calon		
	a. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon	14 Juli 2015	25 Juli 2015
	b. Pendaftaran Pasangan Calon	26 Juli 2015	28 Juli 2015
	c. Pemeriksaan kesehatan	26 Juli 2015	1 Agustus 2015
	d. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	1 Agustus 2015	2 Agustus 2015
	e. Penelitian syarat pencalonan dan syarat calon	28 Juli 2015	3 Agustus 2015
	f. Pemberitahuan hasil penelitian	3 Agustus 2015	4 Agustus 2015
	g. Perbaikan syarat pencalonan dan/ atau syarat calon:		
	1) Perbaikan syarat pencalonan Partai Politik/gabungan Partai Politik	4 Agustus 2015	7 Agustus 2015
	2) Perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan Bupati dan Wakil	4 Agustus 2015	7 Agustus 2015
	3) Perbaikan syarat Pasangan Calon dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik Bupati Wakatobi dan Perseorangan	4 Agustus 2015	7 Agustus 2015
	h. Penelitian hasil perbaikan :		

1) Penelitian perbaikan syarat pencalonan Partai Politik/ gabungan Partai Politik	8 Agustus 2015	14 Agustus 2015
2) Penelitian perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi:		
a) Penelitian jumlah minimal dukungan	4 Agustus 2015	9 Agustus 2015
b) Analisis dukungan ganda	4 Agustus 2015	9 Agustus 2015
c) Penyampaian Hasil Analisis Dugaan Ganda Dan Syarat Dukungan Oleh KPU Kabupaten Wakatobi Kepada PPS Melalui PPK	10 Agustus 2015	11 Agustus 2015
d) Penelitian administrasi dan faktual di tingkat desa/ kelurahan	12 Agustus 2015	16 Agustus 2015
e) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kecamatan	18 Agustus 2015	19 Agustus 2015
f) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat Kabupaten Wakatobi	20 Agustus 2015	21 Agustus 2015
g) Penelitian perbaikan syarat calon	8 Agustus 2015	14 Agustus 2015
h) Penetapan Pasangan Calon	24 Agustus 2015	24 Agustus 2015

Pemilukada bukanlah hal yang baru bagi masyarakat Kabupaten Wakatobi karena sebelumnya telah dilakukan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung, dan pilkada

kembali dilakukan pada tahun 2015 dengan jumlah DPT sebanyak 76.870 orang berdasarkan data KPU Kabupaten Wakatobi tahun 2015 dan berikut adalah table nama pasangan calon dan partai pendukungnya seperti pada tabel berikut di bawah ini.

Tabel 10. Daftar Nama-nama dan Partai Pendukung Calon Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2015

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Pendukung
	Kepala Daerah	Wakil Kepala Daerah	
1	Haliana, SE	Muhammad Syahwal, ST.	PDIP Partai Demokrat PKB
2	H. Arhawi, SE	Ilmiati Daud, SE, M.Si.	PAN Partai Hanura Partai Gerindra

Sumber: KPU Kabupaten Wakatobi 2015.

Berdasarkan tabel di atas berlangsungnya Pemilukada Kabupaten Wakatobi tahun 2015, dimana para kandidat bertarung untuk mendapatkan dukungan mayoritas dari masyarakat. Berikut perolehan suara masing-masing kandidat sebagaimana yang digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 11. Daftar Nama-Nama dan Perolehan Suara Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No Urut	Nama Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati	Jumlah perolehan suara	Persentase (%)
1	Haliana, SE dan Muhammad Syahwal, ST	28.096	49,31%
2	H. Arhawi, SE dan Ilmiati Daud, SE, M.Si	28.873	50,69%
Total suara		56.969	100 %

Sumber: KPUD Kabupaten Wakatobi Tahun 2015

Berdasarkan hasil pemilukada Kabupaten Wakatobi dimana yang mendapat legitimasi dari rakyat Wakatobi sebagai pemenang adalah pasangan H. Arhawi, SE dan Ilmiati Daud, SE, M.Si yang memperoleh total suara 28.873 dengan persentase (50,69%) dari total jumlah suara yang ditetapkan KPUD Kabupaten Wakatobi sebanyak 56.969 suara sah. Sementara pasangan Haliana, SE dan Muhammad Syahwal, ST berada pada urutan kedua yang hanya memperoleh suara sebanyak (28.096) dengan persentase (49,31%).

Dilantiknya bupati dan wakil bupati terpilih pada tanggal 28 Juni 2016, menandakan bahwa seluruh rangkaian proses Pemilukada telah berakhir. Dan semua masyarakat Wakatobi berharap bupati dan wakil bupati terpilih mampu memimpin Kabupaten Wakatobi.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung merupakan progresitas dan inovasi dalam mewujudkan demokrasi di tingkat lokal. Proses pemilihan kepala daerah langsung dimana, rakyat berpartisipasi langsung menentukan pemimpin di daerahnya. Pemilihan

kepala daerah menjadi peluang bagi penguasa (bupati) dan pengusaha dalam proses pergantian kekuasaan, serta peluang pengusaha untuk berelaborasi dengan pemimpin daerah.

Setelah penulis melakukan penelitian selama kurang lebih tiga bulan melalui observasi secara langsung dan wawancara dengan beberapa informan serta melakukan studi pustaka dari beberapa literatur maka penulis berhasil memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yakni mengenai hubungan antara pengusaha dengan penguasa dalam politik Kabupaten Wakatobi khususnya pada pra dan pasca Pilkada tahun 2015 di Kabupaten Wakatobi

Berdasarkan data yang diperoleh langsung pada lokasi penelitian, maka dalam bab ini penulis akan memaparkan sejumlah hasil dan pembahasan penelitian tentang hubungan antara pengusaha dengan penguasa dalam politik di Kabupaten Wakatobi terutama pada Pilkada dan setelah Pilkada di Kabupaten Wakatobi, seperti yang diuraikan di bawah ini:

1. Hubungan Antara Calon Bupati Nomor Urut Dua Dengan Pengusaha Pada Proses Pilkada Tahun 2015 Di Kabupaten Wakatobi

Perubahan sistem pemilihan kepala daerah dari yang semula dipilih DPRD ke pemilihan terbuka oleh masyarakat, menjadikan PemiluKada sebagai arena kompetisi yang mahal dan menimbulkan konsekuensi masuknya kelompok pengusaha di dalam zona politik sebagai donatur dalam proses pemenangan bupati pada PemiluKada. Relasi pengusaha dan penguasa dalam suksesi PemiluKada di Indonesia dapat dilihat dari keterlibatan pemerintah (penguasa) di dalam pasar, dan keterlibatan (pengusaha) dalam mempengaruhi kebijakan politik.

Koneksitas kekuasaan di Kabupaten Wakatobi tampak jelas

untuk mempertukarkan segala bentuk kepentingan dapat terealisasi, hubungan penguasa (calon bupati bupati) dengan pengusaha di-
 desain sedemikian rupa agar jejaring kekuasaan menjadi tempat ber-
 labuh kalangan pengusaha melakukan pertukaran kepentingan untuk
 memperoleh keuntungan dan manfaat baginya, penguasa (bupati)
 dalam bersinergitas dengan pengusaha adalah mitra yang mem-
 butuhkan pertukaran. Relasi yang di bangun antara yang tertata baik
 sejak pertarungan politik hingga bupati menjadi pemangku ke-
 kuasaan merupakan sumber keuntungan dan manfaat bagi peng-
 usaha.

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan bahwa hubu-
 ngan antara calon bupati nomor urut dua dengan pengusaha pada
 proses Pilkada tahun 2015 di Kabupaten Wakatobi telah terjalin di-
 mana sebelum pemilihan banyak pengusaha yang menjadi tim
 sukses baik tim keluarga, tim pendukung maupun tim sukses keca-
 matan untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2 (H.
 Arhawi – Ilmiati Daud) Pilkada tahun 2015 di Kabupaten Wakatobi
 lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 12. Daftar Pengusaha Yang Mendukung Pasangan Nomor
 Urut 2 Pada Proses Pilkada Tahun 2015 Dikabupaten Wakatobi

No	Nama pengusaha	Nama perusahaan	Jenis pendukung
1	H. La ode Panda	CV. Miranti group	Tim keluarga
2	H.setiawati	CV. Mandiri jaya	Tim sukses
3	Ruslan	CV. Ahly putra	Tim sukses
4	H.Herniati	CV. Sabah raya	Tim sukses
5	Laode Rusli, SE	CV. Nita sari	Tim keluarga
6	Baharudin	CV. Rumah tua perkasa	Tim sukses
7	Zul Fitrah	CV. Sabangka Engineering CV. Tata Bumi Malige Consultant	Tim keluarga

8	Maenuru	CV. Alaska	Tim sukses
9	Kaswiadi	CV. Sentra Desain Consultant CV. Tatalink Consultant CV. Ary Anarchindo Consltant	Tim pendukung
10	M. Ali Bunta	CV. Gema Karya	Tim sukses
11	Sarman	CV. Saputra Group	Tim sukses
12	Ayudin	PT. Toda Perkasa	Tim sukses
13	Dani Fardiman	CV. Lesaa Karya	Tim sukses

Sumber: Desperindag Kabupaten Wakatobi 2017 dan modifikasi hasil wawancara

Berdasarkan tabel di atas bahwa banyak pengusaha yang menjalin hubungan dengan calon nomor urut 2 (H. Arhawi-Ilmiati Daud) pada Pilkada tahun 2015 di Kabupaten wakatobi, mereka berperan sebagai tim sukses, tim keluarga maupun tim pendukung dari kader partai pada pilkada tahun 2015 di Kabupaten Wakatobi dan berikut adalah wawancara yang di lakukan dengan beberapa pengusaha di Kabupaten Wakatobi.

Berikut adalah wawancara yang dilakukan dengan Laode Rusli, selaku direktur dari perusahaan CV. Nita Sari menurutnya

Sebelum pemilihan saya melakukan hubungan dengan salah satu calon pada Pilkada tahun 2015 di Kabupaten Wakatobi disitu saya berperan sebagai tim keluarga yang memberikan bantuan berupa kopi maupun makanan pada tiap-tiap posko pemenagan nomor urut dua di Kecamatan Wangi-Wangi dan perlu diketahui bahwa perusahaan yang saya tempati sekarang adalah perusahaan yang dimiliki oleh H.La Pei yang merupakan adik dari salah satu calon yang tak lain adalah H. Arhawi, SE jadi wajar kalau saya memberikan bantuan kepada saudaranya dan saya berharap agar setelah calon tersebut terpilih maka proyek kontruksi diberikan kepada persahaan yang dikelolanya (wawancara, 18 Februari 2018).

Dari pernyataan Pak Rusli selaku direktur CV. Nita Sari

bahwa sebelum pemilihan H. La Pei melakukan hubungan dengan salah satu calon yang tidak lain adalah kakanya yaitu H. Arhawi di situ dia berperan sebagai tim sukses dari kalangan keluarga yang memberikan bantuan berupa kopi dan makanan pada tiap-tiap posko pemenangan pasangan nomor urut dua di Kecamatan Wangi-Wangi dan dia memiliki harapan agar ketika calon tersebut terpilih agar proyek konstruksi yang ada agar diberikan kepada perusahaannya dan berikut adalah wawancara yang dilakukan dengan Ruslan selaku direktur dari perusahaan CV. Ahly Putra:

Sebelum pemilihan saya berperan sebagai tim sukses di Kecamatan Kaledupa Selatan dalam rangka memenagkan salah satu calon pada Pilkada tahun 2015 di Kabupaten Wakatobi dan menurut saya bahwa ada salah satu calon yang berasal dari Kaledupa yaitu Ilmiati Daud selaku wakil dari H. Arhawi jadi kita sebagai orang Kaledupa harus mendukungnya dan saya menjadi tim sukses karena ada kepentinganku yaitu apabila ada pekerjaan konstruksi jalan di Kaledupa Selatan saya berharap agar pekerjaan konstruksi itu diberikan kepada kami (wawancara, 15 Februari 2018).

Dari pernyataan Ruslan di atas selaku direktur dari CV. Ahly Putra bahwa sebelum pemilihan dia melakukan hubungan dengan pasangan nomor urut dua di situ dia berperan sebagai tim sukses Kecamatan Kaledupa dan menurutnya kenapa harus mendukung calon lain sedangkan ada calon yang berasal dari daerahnya yaitu Ilmiati Daud dan dia memiliki kepentingan dimana ketika calon tersebut terpilih apabila ada proyek konstruksi jalan di Kaledupa Selatan untuk diberikan kepadanya dan berikut adalah wawancara yang dilakukan dengan M. Ali Bunta selaku pemilik sekaligus direktur dari perusahaan CV. Gema Karya.

Sebelum pemilihan saya adalah tim sukses Kecamatan Kaledupa dan perlu di ketahui juga bahwa saya merupakan kader partai PAN dan menurut saya wajar kalau saya harus mendukung calon

dari kader partai kita yaitu H. Arhawi, SE namun di samping itu saya juga memiliki kepentingan dimana ketika calon yang saya pilih nanti tidak melupakan saya dan saya berharap apabila ada proyek konstruksi jalan dikaledupa untuk diberikan kepada kami (wawancara, 21 Februari 2018).

Dari pernyataan M. Ali Bunta di atas selaku direktur dari CV. Gema Karya bahwa sebelum pemilihan dia menjadi tim sukses dari pasangan nomor urut dua yaitu H. Arhawi dan dia merupakan salah satu kader dari partai PAN dan menurutnya kita harus mendukung orang yang berasal dari partai PAN yaitu H. Arhawi dan di samping itu dia juga memiliki kepentingan yaitu ketika calon yang dia dukung nanti terpilih agar proyek konstruksi jalan di kaledupa untuk diberikan kepadanya dan berikut adalah wawancara yang dilakukan dengan H. Harniati selaku direktur dari perusahaan CV. Sabah Raya.

Sebelum pemilihan saya merupakan salah satu pendukung dari calon nomor urut dua sebelum itu saya jelaskan bahwa suami saya Hj. La Aba merupakan sepupu 2 kali dari istri H. Arhawi jadi menurut saya wajar kalau saya harus mendukung keluarganya namun di samping itu saya berharap ketika calon yang saya pilih nanti menang agar proyek yang ada nantinya untuk diberikan kepada kami terutama pekerjaan kontruksi seperti pekerjaan kontruksi jalan (wawancara, 20 Februari 2018).

Dari pernyataan H. Harniati di atas selaku direktur dari perusahaan CV. Sabah Raya bahwa dia merupakan salah satu tim pendukung dari pasangan nomor urut dua dia mendukung karena suaminya merupakan sepupu dua kali dari H. Arhawi dan dia juga memiliki kepentingan dimana ketika calon tersebut nanti terpilih agar proyek konstruksi jalan diberikan kepadanya dan berikut adalah wawancara yang dilakukan dengan Baharudin selaku pengusaha muda sekaligus direktur dari perusahaan CV. Rumah Tua

perkasa.

Hubungan saya dengan salah satu calon cukup dekat karena saya merupakan salah satu tim sukses yang memberikan dukungan suara maupun masa pendukung kepada pasangan calon nomor urut 2 disini saya berperan sebagai tim sukses pasti memiliki kepentingan terutama bagi kita adalah pengusaha dan saya berharap ketika dia menang nanti agar proyek pembangunan diberikan kepada kami (wawancara, 18 Februari 2018).

Dari pernyataan Baharudin di atas selaku direktur dari perusahaan CV. Rumah Tua Perkasa bahwa dia merupakan tim sukses dari pasangan nomor urut dua dia menjadi tim sukses karena memiliki kepentingan yaitu ketika calon yang dia dukung nanti terpilih maka proyek pembangunan agar diberikan kepada perusahaannya.

Berdasarkan data wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan antara calon bupati nomor urut dua dengan pengusaha. Pada proses Pilkada tahun 2015 di Kabupaten Wakatobi sudah terjalin dimana sebelum pemilihan banyak pengusaha yang memanfaatkan Pilkada tahun 2015 untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menjadi tim sukses kecamatan maupun tim pendukung dari kalangan keluarga yang memiliki kepentingan yang sama yaitu mendapatkan proyek.

Hasil di atas menunjukkan bahwa ada keterkaitan antara pengusaha dengan penguasa. Salah satu cara untuk membaca situasi perilaku penguasa dalam memaksimalkan keuntungannya adalah dengan melakukan pendekatan *the New Political Economy* atau yang lebih dikenal dengan istilah *Rational Choice*. Asumsi dasar yang dibangun dalam pendekatan ini adalah bahwa manusia adalah makhluk yang egois dan rasional. Sifat ini akan membuat manusia untuk selalu berusaha secara rasional dapat dilaksanakan dan akan membantu tercapainya kepentingan tersebut. Pada intinya manusia

akan berusaha untuk sebisa mungkin mendapatkan keuntungan yang optimal dengan memanfaatkan segala fasilitas dan kemampuan yang ia miliki dengan segala keterbatasan atau kendala yang ada. Cabang lain dari ilmu kontemporer teori pilihan negara, bermula dengan pandangan bahwa para agen dalam organisasi sektor baik swasta maupun negara akan mempunyai agenda-agenda yang sangat berbeda dari agenda-agenda para principal mereka. Para pelayan publik tidak berbeda dari setiap agen ekonomi lain dalam usaha memaksimalkan kepentingan individual mereka. Kisah tentang pengusaha yang menerobos kekuasaan, baik karena kedekatan, kolusi, maupun peran ganda, sesungguhnya telah masuk dalam kajian ekonomi politik sejak dulu. Pembahasan ini pertama kali dilakukan oleh *Anne Krueger* pada tahun 1973, yang membuat makalah mandiri dari karya *Gordon Tullock*. Teori yang mengkaji masalah itu di kenal dengan sebutan teori perburuan rente ekonomi (*Theory of Economic Rent-seeking*). Teori tersebut menjelaskan fenomena perilaku pegusaha untuk mendapatkan lisensi khusus, monopoli dan fasilitas lainnya dari pihak yang berwenang yang mempunyai kekuasaan atas bidang tersebut. Dengan lisensi khusus, maka dengan mudah pelaku yang lain tidak bisa masuk pasar. Karena itu, perilaku pemburu rente ekonomi biasanya merupakan perilaku anti persaingan atau menghindari persaingan. Seiring dengan alasan sistem ekonomi politik modern dewasa ini, domain negara harus di pisah dari domain swasta. Masing-masing memiliki ciri dan karakteristik berbeda serta diatur dengan aturan main yang berbeda pula. Campur aduk keduanya menyebabkan kedua sistem tersebut mengalami distorsi, yang akan berujung pada ketidakadilan, kesenjangan ekonomi, monopoli, dan korporatisme. Pengusaha memperoleh keuntungan dengan cara bukan persaingan yang sehat di dalam pasar.

Kekuasaan dipakai untuk memengaruhi pasar sehingga mengalami distorsi untuk kepentingannya. Dalam praktiknya perburuan rente ekonomi, pelaku usaha mengundang kekuasaan atau memengaruhi kekuasaan untuk mengambil dari suatu nilai yang tidak dikompensasi. Retorika tentang pelayanan negara mengandainkan bahwa para pejabat pemerintah bagaimanapun juga akan diarahkan untuk bertindak dalam kepentingan publik luas, meski dalam kenyataannya perilaku mereka secara empiris lebih dapat dijelaskan lewat motif-motif kepentingan pribadi yang lebih sempit. Perilaku para pejabat negara dapat di pengaruhi oleh suap, kampanye sumbangan hadiah kepada anggota keluarga, atau janji masa depan. Sejumlah besar aktivitas sektor swasta dengan demikian di selewengkan dari kewirausahaan menghasilkan kekayaan ke perburuan rente (Krueger 1974; Buchanan, Tullock, dkk, 1980). Memang tidak semua pengusaha yang berpolitik berdampak negatif. Namun pengalaman empirik di negara berkembang menunjukkan, kemungkinan tabiat koruptif dari dwifungsi itu justru semakin membesar. Karena umumnya, motivasi utama para pengusaha atau taipan berpolitik guna mempertahankan kepentingan bisnisnya (Harris, 2003). *Tracking* yang dilakukan menunjukkan, pebisnis di negara berkembang yang berpolitik adalah kroni kapitalis, bukan entrepreneur sejati. “Kerajaan” bisnis yang dibangun bukan hasil persaingan usaha sehat dan inovasi bisnis, tetapi dari privilege dan konsesi yang diberikan patron politik. Yashiro Kunio (1990) menamakannya “kapitalis semu” (*ersatz kapitalism*), yaitu pengusaha yang tumbuh karena memiliki hubungan mesra dengan rezim.

2. Hubungan Antara Bupati dengan Pengusaha Pasca Pilkada

Hubungan kasuistik bupati dengan pengusaha yang demikian kuat, menimbulkan konsekuensi atas pembajakan demokrasi politik

lokal yang terjadi lewat terbentuknya kartel bisnis-politik yang berwajah pemburu rente. Politik balas jasa terhadap pengusaha ini menyebabkan praktik pemerintahan menjadi sarang kolusi dan nepotisme. Interelasi penguasa-pengusaha menunjukkan bahwa hubungan ini menjadi fondasi yang kuat terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, juga memberikan ruang untuk semakin terbangunnya kartel bisnis-politik dan hubungan patron klien yang kokoh.

Relasi pengusaha-penguasa, bahkan tidak bisa dilerai eksistensinya dalam panggung politik lokal. Sebab setiap bantuan pasti akan ada imbalannya, misalnya memberi bantuan dengan dasar bahwa akan menerima lebih besar keuntungan atau hanya sekadar untuk berbangga diri bahwa telah memberikan sumbangan kepada penguasa. Masalahnya, yang lebih banyak terjadi, imbalan itu berupa profit dan perlindungan politik semata, sebab pengusaha yang banyak memberikan bantuan kepada penguasa (bupati) cenderung merasa aman dan mempunyai keuntungan besar dalam hubungan itu.

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan bahwa hubungan antara bupati dengan pengusaha pasca Pilkada tahun 2015 di Kabupaten Wakatobi tetap terjalin hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini dimana pengusaha yang pernah mendukungnya mendapatkan proyek konstruksi hal tersebut lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 13. Daftar Pengusaha Pelaksana Proyek Jasa Kontruksi
Dikabupaten Wakatobi Untuk Anggaran Tahun 2017

No	Nama Pengusaha	Nama Perusahaan	Proyek yang di tangani
1	H. La Ode Panda	CV. Miranti Group	- Pembangunan tempat pelelangan ikan
2	H. Setiawati	CV. Mandiri	- Pengadaan peralatan

		Jaya	studio visual
3	Ruslan	CV. Ahly Putra	- Pembangunan jalan baru lentea-tonomeha
4	H. Herniati	CV. Sabah Raya	- Pembangunan jalan patua 1-kahianga
5	Laode Rusli, SE	CV. Nita Sari	- Pemeliharaan berkala jalan puncak tindoi - Pemeliharaan berkala jalan puncak pookamba - Pembangunan akses jalan dan amenitas dtw teekoea
6	Baharudin	CV. Rumah Tua Perkasa	- Peningkatan kantor gedung bupati - Pembangunan gedung non srg
7	Zul fitrah	- CV. Sabangka Engineering - Tata Bumi Malige Consultant - CV. Acess Constlant	- Pengawasan pemeliharaan berkala jalan wisata kapota - Pengawasan peningkatan jalan pncak posalu - Pengawasan peningkatan/pelebaran jalan wungka barakati - Pengawasan pemeliharaan berkala jalan puncak pookamba - Perencanaan peningkatan struktr jalan R.srapto
8	Maenuru	CV. Alaska	- Pembangunan mts wangi - wangi selatan

9	Kaswiadi	<ul style="list-style-type: none"> - CV. Sentra Desain Consultan - Tatalink Consultan - Ary Anarchindo Constlant 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan peningkatan jalan masuk TPA I - Perencanaan pembangunan jalan hotmix plau wangi – wangi - Penyusunan DED pantai tomia - Perencanaan pemeliharaanberkala tirou-patipelong-bontu bontu - Pengawasan peningkatan jalan poros wisata kollo
10	M.ali bunta	CV. Gema Karya	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangnan talud jalan depan polsek kec.kaledpa selatan
11	Sarman	CV. Saputra Group	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeliharaan berkala jalan wisata kapota
12	Ayudin	PT. Toda Perkasa	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan dermaga numana secara terpadu
13	Dani fardiman	CV. Lesaa karya	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan jalan pncak posal - Rehabilitasi gedng kantor
14	Ceng ceng	PT. Golden prima	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan/pelebaran jalan wungka barakati

Sumber: Dinas PU kabupaten Wakatobi 2017

Berdasarkan tabel di atas bahwa hubungan antara bupati dengan penguasa tetap terjalin dimana proyek-proyek pembangun-

an jalan dan sekolah untuk anggaran APBD tahun 2017 ditangani oleh pengusaha kontraktor yang pernah mendukungnya baik yang menjadi tim sukses maupun tim keluarga pada Pilkada tahun 2015 lalu di kabupaten dan berikut adalah wawancara yang dilakukan:

Wawancara yang dilakukan dengan Bupati Wakatobi H. Arhawi, SE menurutnya:

Hubungan pemerintah dan pengusaha pasti ada dalam hal pekerjaan dimana proyek pembangunan pasti dikerjakan oleh pengusaha di daerah contohnya pembangunan jalan pasti dikerjakan oleh pengusaha kontraktor yang ada di daerah jadi saya kira jelas hubungan antara pemerintah dan pengusaha pasti selalu ada dalam hal pembangunan suatu daerah (Wawancara, 06 Maret 2018).

Dari pernyataan Bupati Wakatobi tersebut, terlihat jelas bahwa dalam suatu daerah dibutuhkan kerja sama antara pemerintah dengan pengusaha untuk menciptakan sebuah kerangka kerja dalam koridor pembangunan daerah. Pemerintah (bupati) merupakan mitra yang dapat memberikan kebijakan dan berpihak kepada pengusaha untuk menciptakan kerja sama yang menguntungkan dan berikut adalah wawancara yang dilakukan dengan Usman S. Pd selaku Kabag Pemerintahan Umum menurutnya:

Hubungan antara pemerintah dan pengusaha pasti ada karena apabila ada proyek pembangunan yang dilakukan maka yang menangani proyek itu adalah pengusaha seperti proyek pembangunan jalan maka yang menangani proyek itu adalah pengusaha konstruksi dan untuk mendapatkan proyek tersebut mereka harus mendaftarkan diri melalui tender lelang dimana masing-masing pengusaha harus memenuhi persyaratan admistrasi dan yang utama adalah kemampuan perusahaannya dalam hal peralatan dan pemenang tender nanti diumumkan melalui halaman website <http://lpse.Wakatobikab.go.id> (wawancara, 8 Maret 2018).

Dari pernyataan Bpk. Usman di atas bahwa hubungan antara pemerintah dan pengusaha pasti ada karena apabila ada proyek pembangunan yang di lakukan maka proyek itu di tanggani oleh kalangan pengusahadan untuk mendapatkan proyek tersebut harus melalui tender lelang mereka mendaftarkan perusahaannya dan penawaran harga atas proyek tersebut dan pemenang tender tersebut diumumkan melalui halaman website <http://lpse.Wakatobikab.go.id> dan banyak program yang dibuat pemerintah yang menguntungkan pengusaha dan berikut adalah wawancara yang dilakukan dengan Bpk. Luki Kusuma, SE selaku kepala Kabang Ekonomi dan SDA.

Banyak program program yang dibuat oleh pemerintah untuk mengembangkan pendapatan pengusaha di daerah salah satunya adalah pemberian bantuan uang tunai senilai 20 juta kepada pengusaha melalui Dinas Perinda Wakatobi (wawancara, 06 Maret 2018).

Berdasarkan wawancara di atas bahwa hubungan antara pengusaha dengan pemerintah (bupati) selalu ada salah satunya adalah program bantuan dana usaha yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan pengusaha di Kabupaten Wakatobi dan berikut adalah wawancara yang dilakukan dengan beberapa pengusaha pelaksana proyek jasa konstruksi di Kabupaten Wakatobi untuk anggaran tahun 2017 dan berikut adalah wawancara yang dilakukan dengan Laode Rusli selaku direktur dari perusahaan CV. Nita Sari dan kita telah ketahui bahwa pemilik resmi dari perusahaan ini adalah H. La Pei yang merupakan adik dari bupati H. Arhawi menurutnya:

Hubunganku dengan calon bupati yang pernah saya dukung hingga sekarang menjadi bupati tetap terjalin dimana dengan bupati terpilih sekarang pendapatan kami semakin bertambah dibanding dengan tahun tahun sebelumnya seperti pada tahun 2017 lalu perusahaan kami memenagkan tender proyek sebanyak

3 paket proyek konstruksi yaitu pemeliharaan berkala puncak tindo, pemeliharaan secara berkala puncak pookambua, pembangunan akses jalan dan amenitas DTW teekoea yang ada di Kecamatan Wangi-Wangi (wawancara, 18 Februari 2018).

Dari pernyataan Laode Rusli di atas bahwa hubungannya dengan bupati terpilih sekarang tetap terjalin karena dengan bupati terpilih pendapatan mereka semakin bertambah di banding tahun – tahun sebelumnya karena pada tahun 2017 mereka memenangkan sebanyak tiga paket proyek konstruksi yaitu pemeliharaan berkala puncak tindo, pemeliharaan secara berkala puncak pookambua, dan pembangunan akses jalan dan amenitas DTW teekoea yang ada di Kecamatan Wangi wangi dan berikut adalah wawancara yang dilakukan dengan Ruslan selaku direktur dari perusahaan CV. Ahly Putra dan kita ketahui sebelumnya bahwa dia adalah salah satu tim sukses di kecamatan kaledupa selatan dan menurutnya.

Mengenai hubungan saya dengan bupati terpilih sekarang masih terjalin dimana pada tahun 2017 perusahaan kami mendapatkan proyek konstruksi yaitu pembangunan jalan baru Lentea – Tonomeha yang ada di kaledupa sesuai dengan yang kami inginkan dan kami harapkan tahun ini kami bisa mendapatkan proyek juga (wawancara, 15 Februari 2018).

Dari pernyataan Ruslan selaku direktur dari CV. Ahly Putra bahwa hubungan mereka dengan bupati terpilih sekarang tetap terjalin karena pada tahun 2017 mereka memenangkan satu tender proyek yaitu pembangunan jalan baru Lentea – Tonomeha yang ada di Kaledupa sesuai dengan apa yang mereka harapkan dan berikut adalah wawancara yang dilakukan dengan H. Harniati selaku direktur dari perusahaan CV. Sabah Raya menurutnya:

Dengan bupati terpilih sekarang pendapatan kami semakin bertambah dimana pada tahun 2017 kami berhasil mendapatkan

proyek kontruksi yaitu pembangunan jalan patua 1 – kahiang (wawancara, 20 Februari 2018).

Dari pernyataan H. Harniati selaku direktur dari CV. Sabah Raya bahwa dengan bupati terpilih sekarang pendapatan mereka semakin bertambah karena pada tahun 2017 lalu mereka memenangkan satu tender proyek yaitu pembangunan jalan Patua 1 Kahiang di Kecamatan Tomia Timur dan berikut adalah wawancara yang dilakukan dengan M. Ali Bunta selaku pemilik sekaligus direktur dari perusahaan CV. Gema Karya dan perlu di ketahui bahwa dia merupakan salah satu kader dari partai PAN yang menjadi tim sukses menurutnya.

Dengan bupati terpilih sekarang pendapatan kami semakin bertambah dimana pada tahun 2017 kami mendapatkan proyek kontruksi pembangunan talud jalan depan polsek kecamatan Kaledupa selatan dan kami juga berharap tahun ini kami bias memenagkan tender proyek konstruksi (wawancara, 21 Februari 2018).

Dari pernyataan M. Ali Bunta di atas selaku direktur dari CV. Gema Karya bahwa dengan bupati terpilih sekarang pendapatan mereka semakin bertambah karena pada tahun 2017 memeka memenangkan 1 tender proyek yaitu kontruksi pembangunan talud jalan depan polsek kecamatan kaledupa selatan dan mereka juga berharap agar pada tahun ini mereka bias memenagkan tender proyek dan berikut adalah wawancara yang dilakukan dengan Baharudin selaku pengusaha muda sekaligus direktur dari CV. Rumah Tua perkasa menurutnya:

Dengan bupati terpilih sekarang pendapatan perusahaan kami semakin bertambah dimana untuk anggaran tahun 2017 perusahaan kami memenagkan tender sebanyak dua paket proyek yaitu peningkatan kantor gedung bupati dan pembangunan gedung non srg dan kami berharap agar tahun 2018 perusahaan

kami bisa memenangkan tender proyek lagi kami (wawancara, 18 Februari 2018).

Dari pernyataan Baharudin di atas selaku direktur dari perusahaan CV. Rumah Tua perkasa bahwa dengan bupati terpilih sekarang pendapatan perusahaan mereka semakin bertambah dimana untuk anggaran tahun 2017 mereka berhasil memenangkan tender proyek sebanyak dua paket proyek yaitu peningkatan kantor gedung bupati dan pembangunan Gedung DPRD.

Pola relasi yang dibangun antara calon bupati nomor urut dua dengan pengusaha pada proses dan pasca Pilkada tahun 2015 di Kabupaten Wakatobi berdasarkan data wawancara di atas bahwa banyak pengusaha yang memiliki kepentingan memanfaatkan Pilkada tahun 2015 di Kabupaten Wakatobi untuk mendapatkan keuntungan sebelum pemilihan banyak pengusaha yang menjadi tim sukses pasangan calon nomor urut 2 baik yang menjadi tim pemenang dari kalangan keluarga maupun tim sukses dan setelah pemilihan pengusaha-pengusaha yang pernah menjadi tim keluarga maupun tim sukses banyak memenangkan tender proyek untuk anggaran tahun 2017 di Kabupaten Wakatobi dan untuk mendapatkan proyek tersebut dilakukan melalui tender lelang dimana pengusaha tersebut mendaftarkan perusahaannya, penawaran atas proyek dan lain lain dan yang paling banyak memenangkan tender proyek tersebut berasal dari keluarganya yang tak lain adalah adiknya sendiri yaitu H. La Pei selaku pemilik resmi dari perusahaan CV. Nita Sari.

Pada masa kepemimpinan Hogua pola hubungan yang dibangun antara Hogua dan Ceng – Ceng, Hogua dikenal memiliki kedekatan dengan pengusaha Ceng Ceng, seorang kontraktor asal Bau-Bau. Di Wakatobi Ceng Ceng sangat familiar, ia dikenal sebagai kontraktor yang kerap memenangkan tender proyek. Kehebat-

an Ceng Ceng ini diakui pula oleh salah satu karyawan yang bekerja di perusahaan miliknya.

Ceng-Ceng merupakan kontraktor yang telah lama bermain (menangani proyek) di Wakatobi. Proyek besar di Wakatobi selalu dimenangkan oleh Ceng Ceng. Jika ada kontraktor selain Ceng Ceng yang memenangkan tender, nilai proyeknya sangat kecil, itu sisa-sisa/buangan Ceng Ceng.

Guna mendapatkan banyak proyek, Ceng Ceng mendirikan lebih dari satu perusahaan yaitu Golden Prima Wakatobi dan Tunas Mandiri (praktek kartel). Ia juga kerap menyewa perusahaan lain demi menghindari kecurigaan publik dan badan pemeriksa. Jenis proyek yang di kerjakan oleh Ceng Ceng di antaranya adalah jalan yang didanai oleh APBD Kabupaten dan jalan inspeksi Bandara Mataohara. Sang karyawan menuturkan, kemenangan Ceng Ceng dalam tender proyek di Wakatobi didukung oleh ketersediaan peralatan yang lengkap (alat berat, seperti: mesin pengeruk) yang tidak dimiliki oleh kontraktor lain. Bermodal kelengkapan peralatan itu, Ceng Ceng meski tidak memenangkan tender, ia seringkali diminta oleh pemenang tender (kontraktor lain) untuk mengerjakan proyek yang dimenangkan, atau sekedar meminjam peralatan melalui komitmen pembagian keuntungan. Ceng Ceng juga dianggap berpengalaman dalam mengerjakan proyek di Kepulauan Wakatobi, sejak masih bergabung dengan Kabupaten Buton. Keunggulan Ceng Ceng lainnya adalah memiliki hubungan baik dengan para penguasa di era otonomi daerah. Hubungan baik dipelihara melalui sikap royalnya terhadap penguasa yaitu menjadi donatur pada pagelaran politik penting. Menurut karyawan yang bekerja di perusahaan Ceng Ceng, ‘sang bos’ sampai tahun 2015 merupakan salah satu donatur utama Hugua dalam kegiatan politik.

Perpisahan keduanya berlangsung pada Pemilu 2015,

Hugua mendukung Haliana, sementara Ceng Ceng memberikan dukungan kepada Arhawi (Bupati terpilih Wakatobi periode 2016-2021) dan berdasarkan data yang di peroleh perusahaan PT. Golden Prima yang dimiliki Ceng Ceng memenangkan satu tender proyek untuk APBD tahun 2017 yaitu peningkatan dan pelebaran jalan Wungka Barakati yang ada di Desa Wungka Kecamatan Wangi Wangi.

Arhawi merupakan Ketua DPD PAN Wakatobi dua periode, 2007-2012/2012-2017. Pada Pemilu 2009, PAN berhasil mendudukkan 3 kursi di legislatif sekaligus menempatkan Arhawi sebagai wakil ketua DPRD. Dua tahun menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD (2009-2011), Arhawi terpilih sebagai wakil bupati mendampingi Hugua. Saat menjabat sebagai Wakil Bupati, Arhawi dipercaya memimpin organisasi kepemudaan, KNPI dan Kwardcab Pramuka Wakatobi periode 2011-2015. Di partai, Arhawi tetap dipercaya memimpin PAN Wakatobi. Hasilnya pada Pemilu 2014 PAN berhasil mengirimkan 7 wakilnya di legislatif, perolehan suara PAN hanya berselisih 1 kursi dengan PDI.P, partai yang sangat dominan di Wakatobi. Kesuksesan politik Arhawi diwariskan pula pada keluarganya, Sukardi dan Hamiruddin. Kakak dan ipar Arhawi ini pada Pemilu 2014, terpilih menjadi anggota DPRD Wakatobi dari PAN.

Arhawi dan Hugua memimpin partai yang berbeda, namun keduanya sangat harmonis (tidak terlibat konflik) dalam menjalankan pemerintahan sebagai Bupati-Wakil Bupati terkecuali menjelang Pemilukada Wakatobi 2016. Rivalitas politik keduanya tampak ketika PDIP dan PAN tidak lagi berkoalisi, Hugua sebagai Ketua PDIP Sultra mendukung Haliana-Syawal, sementara PAN mendukung Arhawi untuk menjadi Bupati Wakatobi periode 2016-2021. Persaingan dalam Pemilukada berakhir dengan kemenangan

tipis Arhawi atas Halina.

Kemenangan Arhawi pada Pemilu Pilkada Wakatobi tidak terlepas dari dukungan PAN dan Nur Alam sebagai pimpinan PAN saat itu dan Gubernur Sultra. Di samping itu, Arhawi juga memiliki basis material yang setara bahkan melampaui Hugua. Jika Hugua memiliki Patuno Resort dan Pata Pulo Travel, Arhawi merupakan pemilik Aksar Saputra Grup, perusahaan perkapalan yang melayani angkutan penumpang dan barang yang beroperasi di dalam dan luar Sulawesi Tenggara (Maluku, Maluku Utara, Papua dan Sulawesi). Grup Askar tercatat memiliki beberapa cabang perusahaan dan puluhan kapal angkut penumpang dan barang. Arhawi sebagai pemilik Grup aksar memiliki kekayaan sebesar Rp. 44.150.947.948,56.

Hugua dan Arhawi adalah elite politik yang juga menjadi elite ekonomi di Wakatobi. hal yang membedakan keduanya adalah Hugua memiliki kekayaan setelah menjadi Bupati, sementara Arhawi sebelum memasuki dunia politik telah memiliki basis material besar. Arhawi memiliki latar belakang pengusaha dan pernah menjadi Ketua KADIN Wakatobi pada periode 2006-2008, sedangkan Hugua berlatar belakang aktivis. Meminjam pendapat Winters, masuknya Arhawi dalam politik merupakan bagian dari upaya menambah dan mempertahankan kekayaan, meski hal ini tentu perlu dibuktikan hingga akhir periode kepemimpinannya sebagai Bupati.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab 5

Penutup

A. Kesimpulan

1. Hubungan antara calon bupati nomor urut dua dengan pengusaha pada proses Pilkada tahun 2015 di Kabupaten Wakatobi sudah terjalin dengan baik banyak pengusaha yang memiliki kepentingan memanfaatkan Pilkada tahun 2015 di Kabupaten Wakatobi untuk mendapatkan keuntungan sebelum pemilihan banyak pengusaha yang menjadi tim sukses maupun tim keluarga yang memberikan bantuan material maupun masa pendukung dalam rangka memenagkan pasangan calon nomor urut dua.
2. Hubungan antara bupati dengan pengusaha pasca Pilkada tahun 2015 di Kabupaten Wakatobi tetap terjalin dengan baik karena pada tahun 2017 banyak tim sukses maupun tim keluarga yang pernah mendukungnya yang berasal dari kalangan pengusaha banyak memenangkan tender proyek yang ada di Kabupaten Wakatobi terutama proyek kontruksi jalan maupun pembangunan gedung sekolah.

B. Saran

Sesuai dengan hasil penelitian mengenai hubungan bupati dengan pengusaha yang terjadi di Kabupaten Wakatobi tahun 2015, maka ada beberapa perihal menjadi catatan yang penulis rekomendasikan dan sarankan, yaitu:

1. Sebaiknya bupati dan kalangan pengusaha pro penguasa dapat berlaku profesional dan dewasa dalam aktivitas-aktivitas poli-

tiknya, dengan mengakomodasi kepentingan pengusaha lawan politiknya.

2. Seharusnya kelompok pengusaha dan partai politik dapat melakukan upaya pendidikan secara lebih massif dan konstruktif kepada masyarakat, agar masyarakat dapat lebih cerdas dalam politik dan tidak dijadikan sebagai alat legitimasi oleh kepentingan elit.
3. Perlu dilakukan upaya penguatan demokratisasi pada tingkat lokal sehingga terjadi institusionalisasi politik yang lebih baik di kalangan masyarakat.
4. Sebaiknya bupati dan kalangan pengusaha pro penguasa dapat berlaku profesional dan dewasa dalam aktivitas-aktivitas politiknya, dengan mengakomodasi kepentingan pengusaha lawan politiknya.
5. Seharusnya kelompok pengusaha dan partai politik dapat melakukan upaya pendidikan secara lebih massif dan konstruktif kepada masyarakat, agar masyarakat dapat lebih cerdas dalam politik dan tidak dijadikan sebagai alat legitimasi oleh kepentingan elite.
6. Perlu dilakukan upaya penguatan demokratisasi pada tingkat lokal sehingga terjadi institusionalisasi politik yang lebih baik di kalangan masyarakat.

Daftar Pustaka

- BPS Wakatobi. 2017. Wakatobi dalam Angka.
- Girling, John. 1997. *Korupsi, Kapitalisme dan Demokrasi*. Yogyakarta: Bentang Budaya
- Hadiz, Vedi R. 2005. *Dinamika kekuasaan: Ekonomi Politik Indonesia Pasca Soeharto*. Jakarta: LP3ES.
- Hart, Nathasa Hamilton. 2007. "Government and Private Business: Rents, Representation and Collective Action" dalam R.H. Mcleod and A. MacIntyre (Ed). *Indonesia: Democracy and The Promise of Good Governance*. ISEAS.
- Husain, Najib. Patronage in The General Election of Local Leader – Pemilukada: An Anaysis of Kendari’s Major electon in Kendari. Artikel yang dmiuat pada *Acedemic Research International, No. 2, p: 61-69*
- Keller, Suzanne . 1995. *Elite Strategis*. Jakarta: Tiara Wacana
- Kunio, Yusiro. 1990. *Kapitalieme Semu*. Jakarta: LP3ES
- Muhaimin, Yahya. 1986. *Bisnis dan Politik*. Jakarta: LP3ES.
- Kuncoro, Ari. 2006. "Bisnis dan Politik di Indonesia". *Bulletin Asia* Vol 23 No. 1, p: 23-32.
- Lambsdorf, Johann Graf. "Korupsi dan Rent Seeking", Artikel pada *Mimbar Jurnal Pembangunan*, Vol 13. No. 1/ 2, Oktober 2002.
- Moita, Sulsalman. 2017. *Modal Sosial: Teori dan Aplikasinya pada Masyarakat Heterogen*. Kendari: Literacy Institute.
- Mas’oed. Muhtar & dan Colin, 1986. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: UGM Press.

- Rachbini, Didik J. 2006. *Ekonomi Politik dan Teori Pilihan Publik*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Robison, Richard and Vedi R. Hadiz. 2004. *Reorganizing Power in Indonesia: The Politic of Oligarchy in an Age of Market*. London and New York: Routledge.
- Shidiq, Akhmad Rizal. 2003. “Desentralisasi dan Rent Seeking di Indonesia”. *Ekonomi dan Keuangan Indonesia* Vol 512 tahun 2003.
- Yustika, Ahmad Erani. 2006. *Ekonomi Kelembagaan*. Malang: bayu Media Publishing.
- Suaib, Eka. 2009. *Pemilu Legislatif di Sulawesi Tenggara*. Surabaya: Jenggala.
- Suaib, Eka; La Husen Zuada, Waode Syifatu, 2016. *Decentralization And Oligarchy Predator In Wakatobi: The Role Of Oligarchy's And Elite's Strategic In Rural*. Jurnal LIPI.
- SP Varma, 2001. *Teori Politik Modern*. Jakarta: Rajawali Pers.

Tulisan dalam Website:

- <http://www.scribd.com/doc/118391055/pemburu-rente-rent-seeking> diakses 18 Februari 2018.
- <https://pamidiseme.wordpress.com/2013/06/10/ekonomi-politik-praktik-rent-seeking/> Diakses 20 Januari 2018.
- <https://raconquista.files.wordpress.com/2009/.../politik-ekonomi-lokal>.
- <http://acch.kpk.go.id/statistik/Rekapitulasi-Penindakan-Pidana-Korupsi/> diakses pada 18 Februari 2018.
- <http://daerah.sindonews.com/read/2013/12/31/107/822446/pilkada- pesta-korupsi-kepala-daerah/> diakses pada 20 Februari 2018.

<https://ml.scribd.com/.../PEMBURU-RENTE-RENT-SEEKING>
diakses 20 Januari 2018.

<http://lpse.Wakatobikab.go.id>.

